

SKRIPSI

**PENGARUH *SMART ECONOMY* TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada 4 Kota di Provinsi Aceh)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RIFQI
NIM. 190602187**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rifqi
NIM : 190602187
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 04 Oktober 2022

Yang menyatakan



Muhammad Rifqi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

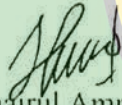
Pengaruh *Smart Economy* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 4 Kota di Provinsi Aceh)

Disusun Oleh:

Muhammad Rifqi
NIM: 190602187

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Pembimbing II


Azimah Diah, SE., M., Si., AK
NIDN. 2026028803

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah,


Dr. Nizam Sari, Lc., M.Ag
NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGARUH *SMART ECONOMY* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 4 Kota di Provinsi Aceh)

Muhammad Rifqi

NIM : 190602187

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan

Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Studi Strata Satu (S-I) dalam Bidang Ekonomi Syariah

24 Juli 2023

Pada Hari/Tanggal : Senin

6 Muharam 1445 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

NIP/NIDN 0106077507

Azimah Dianah, SE., M., Si., AK

NIP/NIDN 2026028803

Penguji I

Penguji II

Dr. Zainuddin, S.E., M.Si.

NIP/NIDN 0108107105

Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Rifqi

NIM : 190602187

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602187@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Dengan Judul :

PENGARUH *SMART ECONOMY* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 4 Kota di Provinsi Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Rifqi
NIM: 190602187

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIP/NIDN 0106077507

Azimah Dianah, SE., M.Si., AK
NIP/NIDN 2026028803

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Smart Economy* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 4 Kota di Provinsi Aceh)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE. M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN - AR-Raniry
3. Dr. Khairul Amri, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar,

memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

4. Azimah Dianah,SE.,M.,Si.,AK selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammd Jafar dan Ibunda tercinta Ita Zahara yang selalu menyayangi penulis dan memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun materil, yang telah memberikan dukungan dan arahan penulis ucapkan terima kasih.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya ucapkan terima kasih, terkhusus kepada saudara kandung saya serta teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis ucapkan terima kasih.

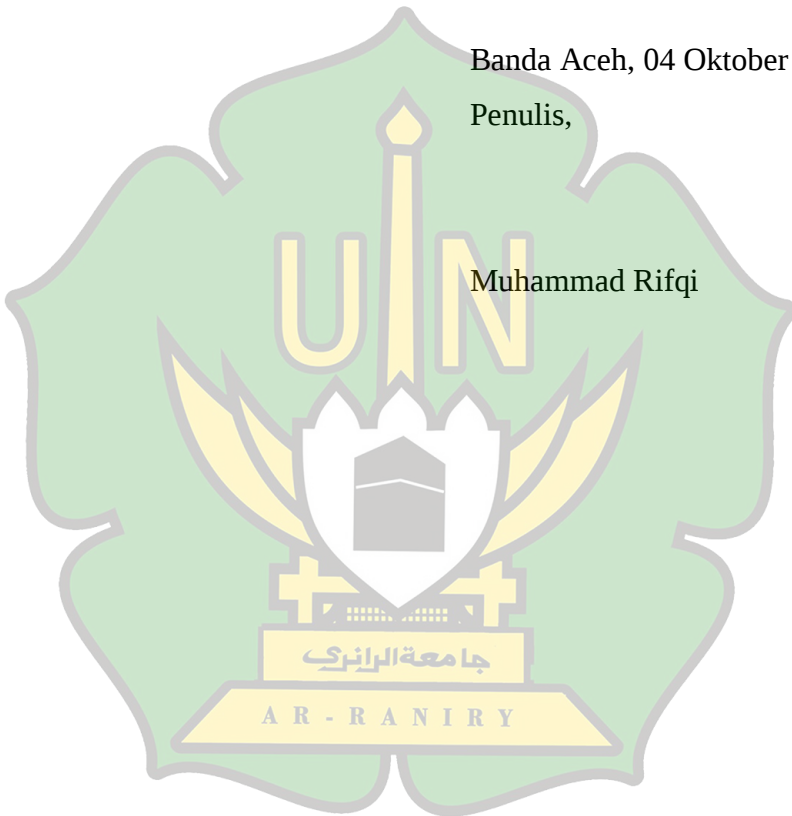
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun

yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 04 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Rifqi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun 2019–Nomor:0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Tha
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي	<i>Fatḥah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

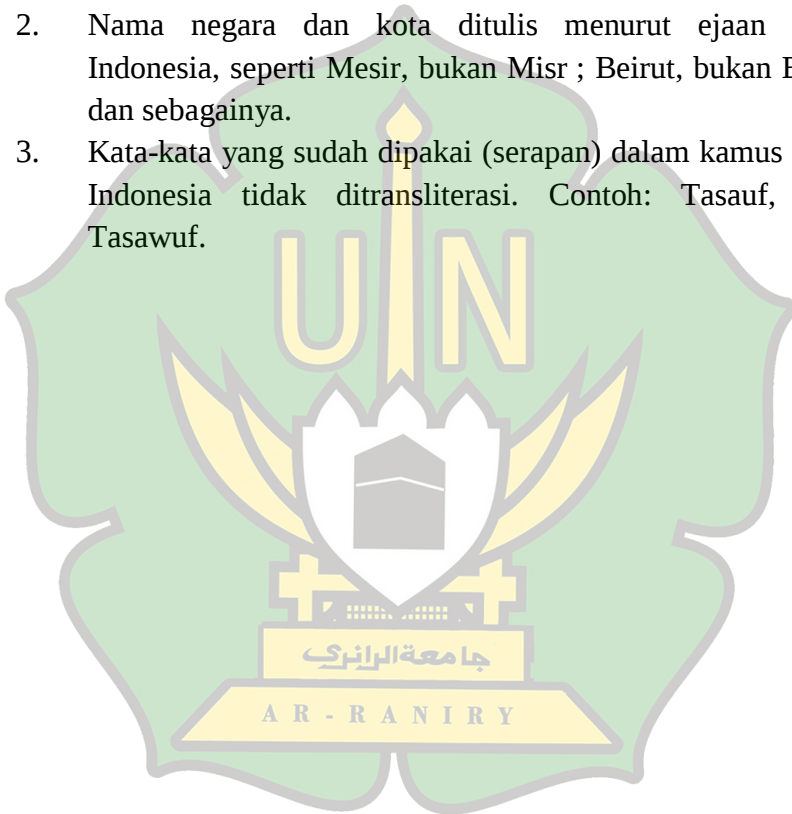
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Rifqi
NIM : 190602187
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh *Smart Economy* terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
4 Kota di Provinsi Aceh)
Tebal Halaman : 114 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairul Amri,SE.,M.Si
Pembimbing II : Azimah Dianah,SE.,M.Si.,AK

Provinsi Aceh termasuk salah satu daerah yang ditunjuk Kominfo untuk menerapkan kota berbasis Smart City, salah satu bagian smart city adalah *Smart Economy* yang mana guna menopang perekonomian di Aceh, Setelah beberapa tahun dijalankan adakah dampak dari trobosan baru tersebut terhadap perekonomian di Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh dari *Smart Economy* (JLT,JPI,DPK,PDRB,dan UMKM) terhadap PAD 4 Kota Di Aceh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan objek penelitian menggunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Menggunakan jenis data sekunder berupa data panel (Pooled data). Analisis data dengan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Pengguna Internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. UMKM berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PAD. Secara simultan jumlah Jumlah Pengguna Internet, DPK, dan UMKM berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci: *Smart Economy*,JLT,JPI,DPK,PDRB, dan UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	23
1.4.1 Manfaat Teoritis	23
1.4.2 Manfaat Praktis	23
1.5 Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	25
2.1 Pendapatan Asli Daerah	25
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	25
2.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah	28
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
2.2 <i>Smart Economy</i>	39
2.2.1 Pengertian <i>Smart Economy</i>	39
2.2.2 Indikator <i>Smart Economy</i>	42
2.2.3 <i>Smart Economy</i> dalam Perspektif Islam	49
2.3 Penelitian Terkait	71
2.4 Keterkaitan Antar Variabel	78

2.4.1 Pengaruh jumlah lulusan perguruan tinggi terhadap Pendapatan (PAD).....	78
2.4.2 Pengaruh jumlah pengguna jaringan internet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79
2.4.3 Pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80
2.4.4 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81
2.4.5 Pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	82
2.5 Hipotesis Penelitian	85
BAB III METODE PENELITIAN.....	87
3.1 Desain Penelitian	87
3.2 Jenis Data Dan Teknik Perolehan Data	87
3.3 Populasi dan Sampel.....	88
3.3.1 Populasi	88
3.3.2 Sampel	88
3.4 Teknik Pengumpulan Data	89
3.5 Operasionalisasi Variabel	90
3.6 Metode dan Analisis Data.....	95
3.6.1 Regresi Data Panel	95
3.6.2 Pengujian Model	97
3.7 Pengujian Hipotesis	99
3.7.1 Uji Parsial (Uji-t).....	99
3.7.2 Uji Simultan (Uji-F)	101
3.7.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Deskripsi Data Penelitian	77
4.2 Korelasi antar variabel.....	81
4.3 Uji Normalitas	81
4.4 Uji Pemilihan model.....	83
4.5 Analisa hasil uji regresi Data Panel.....	85
4.7 Hasil dan pembahasan	90

BAB V_PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh	19
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	57
Tabel 3.1 Daftar Kota di Provinsi Aceh yang Menjadi Sampel .	66
Tabel 3.2 Definisi Operasional	69
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	77
Tabel 4.2 Korelasi Antar Variabel.....	79
Tabel 4.3 Hasil Regresi Panel.....	80



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	62
Gambar 3.1 Histogram dan Normality Test	80



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data Data Penelitian	62
Lampiran 2 Analisis Deskriptif	88
Lampiran 3 Fixed Effect Metode	80
Lampiran 4 Common Effect Metode.....	98
Lampiran 5 Random Effect Metode	99
Lampiran 6 Uji T	100
Lampiran 7 Uji F	101
Lampiran 8 Riwayat Hidup	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi suatu wilayah menginterpretasikan suatu keberhasilan pembangunan meskipun ekonomi bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan Pembangunan, untuk melihat pertumbuhan ekonomi ada 3 cara yaitu: Pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi:2003). Menurut teori Transformasi Struktural yang dipelopori oleh W. Arthur Lewis, teori ini berfokus pada mekanisme yang membuat negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mentransformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa.

Menurut Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Sektor

pertanian adalah sektor tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor pertanian. Sektor industri modern adalah sektor modern dan output dari sektor ini akan bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output. Sedangkan Kuznets (2013) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita akan selalu mengalami kenaikan. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan menurunnya tingkat

kegiatan perekonomian suatu negara. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan menjalankan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2017).

Pembangunan di dalam lingkup daerah secara spasial tidak terlalu merata. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan bertujuan untuk penghapusan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif, dan peningkatan *Gross National Product* (GNP) kelompok miskin. Permasalahan perkotaan yang umum terjadi ialah pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menimbulkan berbagai permasalahan kota, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Serta proses globalisasi dan integrasi juga yang menuntun kota untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya

untuk meningkatkan sumber daya investasi guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari permasalahan tersebut, muncul konsep kota cerdas (*Smart city*). Pada tahun 2011 kemunculan dan perkembangan pesat revolusi 4.0 telah mendorong perkembangan teknologi ke arah berbagai aspek (Kartika, 2015). *Smart City* merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan *smart city* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya. *Smart Economy* adalah salah satu komponen dari *smart city*. Konsep *smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan. *Smart Economy* adalah salah satu komponen dari *smart city*. Konsep *smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan. Pada penelitian ini peneliti hanya akan meneliti *Smart Economy* sebagai salah satu faktor pendorong *smart city*.

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi.

Implementasi dan penilaian smart city pada bagian (dimensi) *Smart Economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitives*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya disuatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk melihat kemajuan ekonomi bisa juga melihat jumlah pendapatan perkapita, dimana pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara. Semakin besar pendapatan perkapita, maka negara tersebut akan dinilai semakin makmur.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan dan juga jumlah penduduk.

Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita sangat penting sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan faktor mana yang lebih memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan perkapita. Hal itu dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diambil dan diharapkan akan dapat mempermudah pengambilan suatu kebijakan, sehingga berbagai kemungkinan yang terjadi dari segi kerugian maupun kelemahan dapat ditanggulangi. Dapat diharapkan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang ada diwilayahnya masing masing. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut perlu adanya pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga pemerataan perekonomian merata di masyarakat (Mahmudi, 2015). Retribusi daerah memiliki peranan yang untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) yang

bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaanya dilakukan oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh (Darwin, 2010:166).

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri ditempat parkir, baik itu garasi mobil, peralatan parkir atau ruang parkir gedung dan taman parkir yang disediakan. Pembangunan pusat kegiatan pada kota sangat pesat sehingga menimbulkan tarikan perjalanan yang tinggi dan tentunya berdampak pada kebutuhna ruang parkir yang aman dan nyaman. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kepada pengguna fasilitas parkir untuk umum diperlukan suatu standar pelayanan perparkiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir yang disediakan masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah (Halim, 2014: 67).

Kota Banda Aceh memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah dimana sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Banda Aceh dan salah satunya adalah hasil dari retribusi. Jumlah kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya.

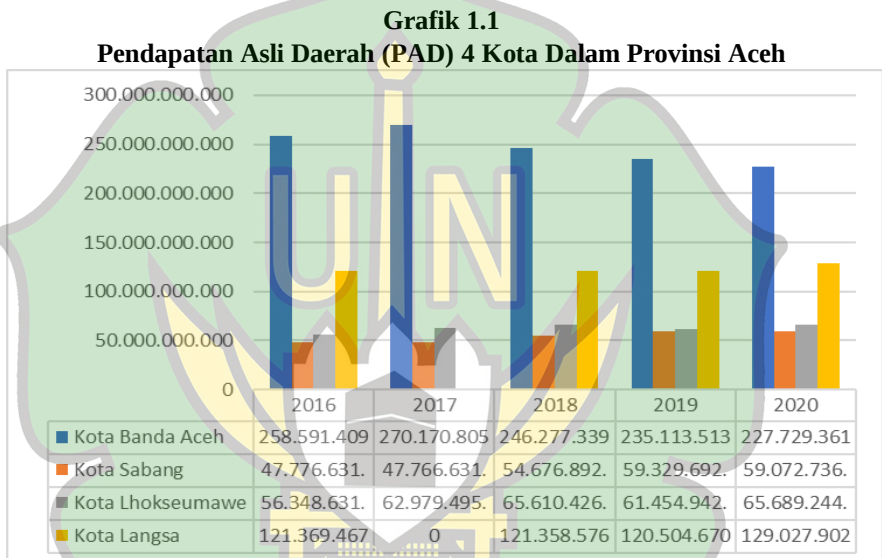
Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 18 ayat 2 tentang penetapan jenis atau golongan retribusi menetapkan retribusi daerah dalam tiga

golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir.

Smart Economy merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu daerah sehingga dimensi *Smart Economy* merupakan dimensi yang paling penting untuk menerapkan konsep *Smart Economy* di kota Banda Aceh. Hal ini otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik dibadan jalan atau diluar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalulintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah Kota Banda Aceh berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan jalan yang baru atau memperbaiki jalan jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut memberikan dan membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya diterapkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan dibidang

perparkiran. Selanjutnya dari penerima retribusi parkir Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilai peningkatannya sangat signifikan dari tahun 2011-2020. Sedangkan persentase peningkatannya berfluktuatif dari tahun 2011-2020 sebagaimana pendeskripsian dari Grafik 1.1, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2022)

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah PAD yang teralisasi pada periode 5 tahun kebelakang secara umum mengalami Fluktuasi setiap tahunnya. Tetapi di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 mengalami Penurunan dengan jumlah Pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 246.277.339.356 sedangkan di tahun sebelumnya 2017 pendapatan yang terealisasi sebesar Rp. 270.170.805.366 dan terus mengalami penurunan di tahun 2019-2020. Penurunan PAD yang terealisasi

tersebut dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian realisasi PAD dengan memindahkan beberapa pos anggaran (tidak dianggap lagi sebagai PAD). Secara umum kita bisa melihat bahwa jumlah realisasi PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berarti pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Selain itu terlihat bahwa salah satu tujuan dari *Smart Economy* adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Andre (2017), salah satu pencapaian dari *Smart Economy* adalah angka kemiskinan dalam suatu kota. Dalam lingkup yang lebih luas kemiskinan dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat sebagai representasi tingkat kesejahteraan manusia di 4 Kota dalam Provinsi Aceh.

Jika ditinjau dari perspektif Islam *Smart Economy* atau ekonomi cerdas meliputi inovasi dan daya saing, smart mobility atau mobilitas yang cerdas berarti sinergi dari infrastruktur dan transportasi, smart government atau pemerintahan yang cerdas melibatkan partisipasi warga kota dan sekaligus usaha pemberdayaan warga, *smart people* atau masyarakat yang cerdas mencakup aspek kreativitas sebagai kekayaan lokal, *smart living* atau kehidupan yang cerdas adalah masyarakat yang mengembangkan budaya setempat serta meningkatkan kualitas kehidupan warga kota, dan smart environment atau lingkungan yang cerdas meliputi aspek sumber daya dan keberlanjutan (Darwin,2010:166).

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-nisa : 4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI,2006:59).

Maksud dari ayat tersebut bahwa sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan Para Ulil Amri (pemimpin) diantara kita, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin disini dapat diartikan pemerintah yang membawa arah kebaikan atau kemaslahatan umat (Aljumanatul, 2004:75). Menurut tafsiran al-Misbah karya M.Quraish ayat ini menjelaskan untuk mengikuti orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, orang-orang yang bisa di andalkan dalam penangan persoalan-persoalan yang ada di negara demi kebutuhan dan kemaslahatan ummat/publik, karena negara dan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan, sehingga perlunya kita mengikuti

segala kebijakan yang telah di buat oleh para pemangku kebijakan asalkan sesuai dengan prinsip Syariah termasuk dengan penerapan smart *Ecomony* yang telah di tetapkan oleh Pemerintah demi kebaikan masyarakat

Dan juga dijelaskan pula pada surat an-nisa: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui berbagai macam jalan yang telah di atur oleh syariat dengan kata lain dengan cara jalan yang halal misalnya berinvestasi, berniaga, Bertani, dan lain sebagainya

Kota Banda Aceh terpilih yang terpilih sebagai salah satu kota yang masuk dalam program *Smart City* oleh Kementerian Kominfo RI dalam Provinsi Aceh, karena telah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun Kota Banda Aceh agar kedepan menjadi kota pintar Islami yang inovatif dan kompetitif. Sehingga dapat mewujudkan kota yang berkelanjutan,

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintah Kota dalam Provinsi Aceh yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2019 *Smart Economy* telah diwujudkan di Kota Banda Aceh dalam Provinsi Aceh yaitu dengan membangunkan pembangunan Ruang command center. Ruang command center merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik yang menyediakan berbagai informasi di lingkup pemerintahan. Ruangan ini dapat difungsikan semua sebagai tempat untuk memonitor semua aktifitas masyarakat di Kota Banda Aceh. Bahkan wali kota juga bisa memantau aktifitas pemerintahan hingga mendapatkan berbagai data valid dengan cepat. Selain itu, command center juga mampu menghadirkan berbagai informasi dan data yang dibutuhkan, mulai dari kondisi lalu lintas, informasi layanan kesehatan, transportasi, destinasi wisata hingga harga terkini sembako.

Perkembangan pembangunan yang telah dicapai saat ini juga mengindikasikan adanya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan layanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah 4 Kota dalam Provinsi Aceh semakin ditingkatkan sejalan dengan digulirkannya konsep *Islamic Smart Economy*. Peningkatan kualitas pelayanan, ditopang dengan infrastruktur yang memadai, serta terciptanya lingkungan yang nyaman adalah tiga instrument utama dalam mengaktualisasi konsep (ISE) pada gilirannya dapat mengenjot inovasi 4 Kota dalam

Provinsi Aceh dengan adanya peningkatan pendapatan Asli Daerah. Kota akan menjadi pintar apabila investasi pada sumber daya manusia dan modal sosial serta infrastruktur sistem komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata pemerintahan yang partisipatif (Caragliu dkk, 2011: 45).

Kota Banda Aceh dikategorikan sebagai *Smart Economy* dalam hal investasi pada sumber daya manusia hal tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintahan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, untuk segi infrastruktur dalam pelaksanaannya pemerintahan Kota Banda Aceh memberikan kemudahan pelayanan seperti perizinan dalam mengurus surat izin tempat usaha dan dari segi lingkungan lokasi wisata di Kota Banda Aceh telah menunjukkan pengelolaan yang baik dengan adanya tempat sampah dan juga taman-taman yang membuat wisatawan lebih nyaman. Untuk bisa menjadi negara dengan daya saing tinggi harus ada beberapa yang harus terpenuhi di antaranya meliputi infrakstruktur, kualitas birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan, yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing industri.

Daya saing industri merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari daya saing ekonomi suatu negara. Daya saing industri harus melibatkan segala aspek parameter daya saing untuk memperkuat daya saing industri tersebut. Salah satu parameter pengukuran dari

daya saing industri adalah tingkat keterterimaan produk negara tersebut di pasar global maka minimum ada dua hal yang harus terpenuhi yaitu hak cipta dan memenuhi standar international. Dalam ekonomi Islam pun tujuan utama dari pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus bisa menjamin kesehatan masyarakat, menyediakan pendidikan bagi masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakat, menyediakan lingkungan yang bersih, dan menciptakan keamanan bagi masyarakat.

Selama ini pengukuran tingkat kesejahteraan identik dilakukan dengan mengukur tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara pada satu tahun tertentu. Semakin tinggi nilai PDB suatu negara maka akan semakin tinggi tingkat produktifitas negara tersebut yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita masyarakat yang dihitung dari nilai PDB dibagi total jumlah penduduk pada tahun tertentu.

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*) (hidayat, 2016). Dalam hal ini, salah satunya yaitu transaksi keuangan.

Transaksi keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Di Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran tunai berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) sebagai media pemindahan dana.

Salah satu daerah yang sangat fokus dan giat dalam mengembangkan pariwisata adalah Kota Sabang Provinsi Aceh. Kota Sabang terkenal dengan julukan Nol Kilometer Indonesia, selain itu juga dikenal memiliki pemandangan yang indah dan taman laut yang mempesona. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra, Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, kota ini sering disebut titik paling utara Indonesia. Kota Sabang cukup terkenal di mancanegara dengan destinasi wisata alam dan laut yang berada di Pulau Weh yang sangat indah dan juga menjadikan salah satu destinasi wisata mancanegara, tak kurang setiap tahun jumlah wisata dari mancanegara yang berkunjung ke Sabang meningkat setiap tahunnya. Kota Sabang

memiliki benteng peninggalan Angkatan Laut Jepang yang sebagian di antaranya masih berdiri kokoh. Julukan Kota Seribu Benteng pun tersemat pada titik paling utara Indonesia. Tahun 2019 lalu Kota Sabang juga mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata terunik (API). Tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan antara lain, Iboih, Pulau Rubiah Gapang, KM 0, Gua Sarang, Pasir Putih, Benteng Anolitam, Pantai Kasih, Pulau Rubiah, dan tempat-tempat wisata yang lain, kuliner lokal dapat dijadikan produk wisata seperti, mie pingsun, mie sedap, mie gurita, mie jalak, salak khas Sabang, mbakpia, dodol Sabang.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh dan merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe terletak di antara dua kota besar, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Medan sehingga menjadi wilayah distribusi perdagangan jalur darat. Selain itu, Kota Lhokseumawe dikenal sebagai wilayah “Petro Dollar” karena memiliki keunggulan dari segi pertambangan seperti sumur gas yang dikelola oleh PT. Exxon Mobil serta dengan banyaknya sungai menciptakan banyak galian untuk pasir dan kerikil yang dipasarkan sampai luar wilayah Aceh. Walaupun dengan wilayah yang kecil namun memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, harus juga dibarengi dengan kemampuan untuk mengelola dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan daerah tersebut. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran ada baiknya kita

mendalami tentang kondisi setiap daerah. Meskipun Kota Lhokseumawe memiliki keunggulan dari hasil tambangnya, namun disana juga terdapat berbagai keindahan alam dan keberagaman budaya sehingga dapat memunculkan potensi-potensi wisata. Kota Lhokseumawe memiliki 4 (empat) kecamatan di dalamnya, yakni Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat. Dari semua kecamatan tersebut, terdapat 5 (lima) jenis wisata yang ada di Kota Lhokseumawe mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata budaya/spiritual dan wisata religi. 5 (lima) destinasi wisata Kota Lhokseumawe, meliputi Sawah Mane Kareung, pantai Ujong Blang, Waterboom Mangat Ceria, Bukit Goa Jepang, dan Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Langsa merupakan kotamadya yang berada di wilayah administratif Propinsi Aceh memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Pemerintah Kota Langsa memiliki wewenang sendiri untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, termasuk di dalamnya adalah potensi sumber daya sektor pariwisata nya. Kota Langsa memiliki sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan serta dipasarkan, mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi guna meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat Kota Langsa. sebagai salah satu destinasi wisata di kota Langsa lahir dari potensi desa tersebut yang sudah ada, artinya Desa Kuala Langsa memiliki

Hutan Mangrove-nya dan Desa Paya Bujok Seuleumak memiliki Hutan Kota-nya Yang menjadi karakteristik dari mangrove di Kota Langsa terletak pada bermacam-macam jenis dari pohon Mangrove, yaitu sekitar 38 jenis bahkan lebih. Dan ini bisa dikatakan pohon Mangrove paling lengkap dibandingkan daerah lainnya. Selain wisata Pohon Mangrove kota Langsa juga terkenal dengan industri Terasi (belacan) yang merupakan bumbu masak yang di buat dari ikan kecil/ udang rebon (udang yang berukuran kecil, sebesar lidi/ udeung sabee dalam bahasa Aceh) yang difermentasikan, berbentuk seperti adonan yang berwarna hitam kecoklatan atau ditambah bahan pewarna sehingga menjadi kemerahan. Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat, Kota langsa. Merupakan salah satu kawasan penghasil terasi terbanyak dan terkenal di kota langsa maupun di luar daerah. Dan menjadi buruan oleh masyarakat di Kota Langsa maupun luar daerah sebagai Oleh-oleh khas dari kota Langsa.

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 4 Kota (Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa) dari tahun 2011 hingga 2020 mengalami kenaikan tiap tahunnya artinya 4 kota tersebut kemampuan sumber daya ekonomi bertumbuh baik tiap tahunnya. Diketahui pula pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahun mengalami kenaikan.

Seperti penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani & Nugraha, (2018) menunjukkan bahwa konsep smart city di Kota Magelang baru diterapkan 3 tahun terakhir ini, namun

perestasi Kota Magelang sangat baik terutama dalam perubahan kota. Dalam pelaksanaannya, Kota Magelang telah memiliki perubahan dalam layanannya, serta telah adanya aplikasi layanan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat ego sektoral yang merupakan masalah atau kendala yang belum terselaikan sampai sekarang sehingga Kota Magelang masih dalam proses mewujudkan konsep smart city yang sebenarnya.

Hal yang sama juga diteliti oleh Utlum Nimiangge, (2021) menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda (R^2) diperoleh sebesar 0.984, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sebesar 98.4%, sedangkan sisanya 1.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan berdampak akan kemajuan perekonomian suatu daerah. Hal ini semakin terlihat bahwa *Smart Economy* mendukung dan memiliki peran sangat baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan demikian setiap tahunnya tentu akan berpengaruh terhadap penerapan *Smart Economy*. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian untuk memodelkan sistem *Smart Economy* di 4 Kota provinsi Aceh. Hal ini bertujuan agar didapatkan skenario terbaik yang dapat membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penerapan *Smart Economy* khususnya pada 4 kota do provinsi Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Smart Economy* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi 4 Kota di Provinsi Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah lulus pendidikan tertinggi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?
2. Apakah jumlah pengguna jaringan internet berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?
3. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?

4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?
5. Apakah UMKM berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?
6. Apakah Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi, penggunaan jaringan internet, dana pihak ketiga, PDRB perkapita dan UMKM secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah lulus pendidikan tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengguna jaringan internet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020
5. Untuk mengetahui pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi, penggunaan jaringan internet, dana pihak ketiga, PDRB perkapita dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Smart Economy terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau dasar pijakan bagi penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan penelitian pembanding bagi penelitian lainnya, khususnya tentang Smart Economy.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang penerapan *Smart Economy* yang sedang dilakukan oleh Pemerintah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan dan literatur review.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian dahulu dan kerangka penelitian yang ada.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan variabel penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian serta teknis analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan hasil pengolahan data dan analisis atas hasil dari pengolahan data tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha, dan lain-lain penerimaan milik daerah yang sah (Sasana, 2018: 76). Pendapatan asli daerah juga merupakan alat memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut (Mujino, 2020:90).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Mawarni, Darwanis, dan Abdullah, 2013).

Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas azas secara nyata serta bertanggungjawab. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Wati dan Fajar, 2017). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi bahwa Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat, Infaq dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencapai tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki (Halim, 2004:35).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana

kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variabel untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Sumber pembiayaan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 , tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber pada (a) Pajak daerah; (b) Retribusi daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hidayah dan Setiyawati, 2014).

2.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Halim, 2012:101-105) adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Pajak Daerah

Dalam keuangan Pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah termasuk di dalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakter nya, belanja modal dalam keuangan Pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (Ramlan, Darwanis dan Abdullah, 2016).

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Menurut UU No.34 tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Novalistia, 2016).

Dewan Perwakilan rakyat dewasa ini menetapkan pembagian jenis pajak pada pajak daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (Anggoro, 2017:115).

Jenis pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah merupakan salah satu pos terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak yang akan dilakukan oleh Pemerintah (Handayani, Abdullah dan Fahlevi, 2015).

2.1.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Koswara retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atas jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah (Ramlan dkk, 2016), sedangkan Anggoro (2017) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra

prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa yang dimaksud.

Ersita dan Elim (2016) menguraikan macam-macam retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan

- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek.

Semakin besar penerimaan retribusi daerah dalam PAD maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu kembali (Ramlan dkk, 2016).

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Halim, (2014:89) dalam bukunya menyatakan bahwa hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di

atas. Walaupun demikian penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Artinya semakin besar potensi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka semakin besar pula penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Ramlan dkk, 2016).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dikutip oleh Novalistia (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro dan Pendapatan bunga deposito
4. Penerimaan atau tuntutan ganti rugi
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak dan retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah agama yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktifitas manusia termasuk ekonomi, oleh karena itu tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/ keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial (Huda, 2010:190).

Dalam pemikiran Islam, menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal, yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya bertanggungjawab terhadap perekonomian (Huda, 2012:190).

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lainnya yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan mewujudkan persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang (Huda, 2012:191).

Pada masa Islam pemerintah menggunakan biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh negara, adapun sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah / pengurus zakat untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat di syariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kefakiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menegaskan amil atau petugas pemungut (Huda, 2012:25-26). Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“....dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Di Aceh terkait sumber PAD melalui zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dimana pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. Pada Ayat (3) disebutkan bahwa PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawaan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur. Bahkan di ayat (4) dinyatakan pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing masing.

b. Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *Kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharraj* adalah bahwa *kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi

untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi di tanam anggur sedangkan disisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah kharraj yang berbeda beda (Adiwarman, 2010:257).

c. Khums

Para ulama sya'i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun dikenakan khums sebesar 20%, sedangkan ulama sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubait dalam Adi mengatakan bahwa yang dimaksud khums bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang (Karim, 2010:264).

d. *Ghanimah* dan *Fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut ghanimah, jika pergantian pemerintah tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut Fa'i (Huda, 2012:30).

e. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang orang non muslim sebagai ganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam. *Jizyah* sama dengan *pull tax*, karena orang orang yang non muslim tidak mengenal zakat

fitrah, jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.

f. Harus ada nash yang memerintahkan

Setiap pendapatan dalam Negara islam harus diperoleh sesuai dengan huku syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'.

g. Harus ada pemisahan muslim dan non muslim

Islam membedakan antara objek zakat dan pajak muslim dengan non muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

h. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.

i. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan pemerintah Negara keempat adalah adanya tuntunan kemaslahatan umum, yang didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat). Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan dating kemudharatan yang lebih besar lagi.

Pendapatan lainya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya ada yang disebut dengan kaffarah, yaitu

denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan disiang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk kedalam pendapatan Negara (Karim, 2010:266).

Menurut Huda, disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti wakaf, (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu ada kalalah (bagian negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu sukuk (Huda, 2012:35).

2.2 *Smart Economy*

2.2.1 *Pengertian Smart Economy*

Smart Economy merupakan perekonomian yang didasarkan pada inovasi teknologi, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. *Smart Economy* mengadopsi inovasi, inisiatif kewirausahaan baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing, dengan tujuan keseluruhan meningkatkan kualitas hidup semua warga negara (Atmaja, 2023).

Smart Economy merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi.

Implementasi dan penilaian *Smart Economy* pada bagian (dimensi) *Smart Economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitives*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya disuatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Smart Economy adalah salah satu komponen dari smart city. Konsep smart city adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010:3). Komponen *smart city* antara lain meliputi: *Smart Environment*, *Smart Economy*, *Smart government*, *Smart Living*, *Smart People*, dan *Smart Mobility*. Pasar online merupakan salah satu inovasi dari *Smart Economy*, pasar online merupakan tempat yang menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga pembeli dapat melihat barang-barang secara online (Loekamto, 2012). Pasar online berjualan melalui internet seperti berjualan di sosial media, aplikasi dan e commerce

pasar online memberikan kemudahan bagi para pembeli antara lain penghematan biaya, barang bisa langsung diantar ke rumah, pembayaran dilakukan secara transfer, dan harga lebih bersaing (Juju dan Maya dalam Chacha Andira Sari, 2015). Sehingga para pembeli lebih efektif dalam berbelanja. Hal tersebut dapat mensejahterakan para pedagang

Smart Economy atau ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Perwujudan dari *Smart Economy* adalah apabila Kota Surakarta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya. Berdasarkan Griffinger dkk (2007:10- 14) ada tujuh indikator untuk mencapai *Smart Economy*. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung Kota Surakarta mencapai *Smart Economy* adalah semangat berinovasi dan berkreasi, kewirausahaan, citra dan siri khas kota, produktivitas, pasar tenaga kerja yang fleksibel, konektivitas dengan dunia internasional. serta kemampuan untuk bertransormasi.

Menurut Davies, S. J. Mullin, (2011) *Smart Economy is a green economy; it encourages reduction of the amount of carbon, dioxide in industry and suggests investing in the clean economy.* Menurut Ariffin, (2012) *Smart Economy is competitive in the spheres ofinnovation, entrepreneurship, intellectual property,*

efficiency and the labour market flexibility and integrates in global markets.

Dari beberapa pengertian diatas, *Smart Economy* menurut Jurgita Bruneckiene (2014) mendefinisikan *Smart Economy* adalah ekonomi yang mana ditandai dengan karakteristik sebagai berikut : inovatif, produktif, digital, integral green, bertanggung jawab secara sosial, jaringan dan respon yang cepat. Pencapaian karakteristik kualitatif dari *Smart Economy* dalam perekonomian nasional memungkinkan kota untuk mejadi lebih layak, transparan, dapat diakses, tumbuh dengan cepat dan menguntungkan untuk lingkungan disekitarnya serta generasi yang akan datang.

2.2.2 Indikator *Smart Economy*

Adapun dimensi *Smart Economy* terkait dengan aspek kehidupan perkotaan meliputi :

1. Industri berdaya saing (*Industry*)

Industri berdaya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Menurut porter daya saing nasional sebagai iuran dari kemampuan suatu negara dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya.

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan “Global Competitiveness Report” mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan. Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, karakter ekonomi yang lain yang mendukung, terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Martin menyatakan konsep definisi Daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
2. Mampu berkompetensi dengan daerah maupun negara lain.
3. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional
4. Dapat menyediakan lapangan kerja
5. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang (Anonim, 2018).

Menurut Tambunan, (2019) terdapat beberapa faktor yang mendukung daya saing suatu industri, diantaranya adalah keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti energi, bahan baku, dan lain-lain.

Pada dasarnya secara umum daya saing didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu industri untuk menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri lainnya. Sehingga faktor yang harus diperhatikan dalam persaingan adalah keunggulan.

Menurut Ismail dan Syafitri, (2015) untuk mengukur daya saing ekonomi daerah, ada empat indikator yang harus digunakan yaitu:

1. Struktur ekonomi yang meliputi kondisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestik.
2. Potensi wilayah yang meliputi non tradeable seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, serta citra daerah.
3. Sumber daya manusia meliputi kualitas sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga distribusi.
4. Kelembagaan meliputi konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-pengembangan ekonomi lokal, serta budaya yang mendukung produktivitas.

Porter membahas bahwa kemakmuran nasional diciptakan bukan diwariskan. Menurut Porter, (2017) menjelaskan bahwa daya saing bangsa tergantung pada kapasitas industri untuk berinovasi. Teori ini juga mencata bahwa tidak mungkin suatu negara unggul

disetiap jenis industri, namun suatu negara dapat meraih sukses di industri tertentu. Porter, (2017) memperkenalkan model *diamond of national advantage* untuk menjelaskan mengapa industri tertentu di suatu negara berhasil.

2. Kesejahteraan Rakyat (*welfare*)

Kesejahteraan rakyat merupakan upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima (Edi Suharto, 2016).

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Dalam rangka mewujudkan hal ini negara harus melakukan beberapa hal :

1. Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi
2. Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara.
3. Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya (Nasikum, 2016).

Menurut Nasikun, (2016) konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

3 Transaksi Keuangan (*Transaction*)

Transaksi keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Di Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran tunai berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) sebagai media pemindahan dana. Sedangkan alat pembayaran non tunai dalam sistem pembayarannya menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana.

Lahdenpera (dalam Jurnal Bank Indonesia, 2006) menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, alat pembayaran non tunai dianggap telah berperan dalam menggantikan uang sebagai alat pembayaran. Metode pembayaran secara transfer antar rekening bank semakin banyak menggantikan peran uang dalam

perdagangan besar dan transaksi-transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu dalam bentuk kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, maupun *stored value card/prepaid card* telah menggantikan peran uang tunai dalam pembayaran retail.

Beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *private-label cards* (misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat debit, seperti debit cards dan ATM (*Automated Teller Machine*) telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut smart card atau chip card, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon Prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti Integrated Circuit (IC), cryptography dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/ATM. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money (e-money)* atau dapat disebut juga *digital money*.

2.2.3 Smart Economy dalam Perspektif Islam

Dalam Islam Ajaran fundamental Islam berasal dari empat sumber Al-Quran dan Sunnah, analogi (*qiyas*), dan konsensus ulama' (*ijma*). Al-Quran memandang kehidupan manusia sebagai proses yang berkesinambungan. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya mengizinkan manusia untuk terlibat dalam segala macam pekerjaan produktif (seperti bisnis), tetapi juga berbagai kewajiban umat Islam.⁸⁶ Dalam konsep bisnis Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangan. Sebagaimana Allah Swt berfirman, Q.S Al Baqarah Ayat 275:

مَنْ يَطْلُ الشَّيْءَ يَتَحَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
أَصْحَبُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى مَرَّةٍ وَاسْلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-*

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S Al Baqarah Ayat 275).

Tafsir ayat dia atas dijelaskan Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima. Allah tidak menyukai dan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang tetap dalam kekafiran karena mempersamakan riba dengan jual beli dengan disertai penolakan terhadap ketetapan Allah, dan tidak mensyukuri kelebihan nikmat yang mereka dapatkan, bahkan menggunakannya untuk menindas dan mengeksploitasi kelemahan orang lain, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang bergelimang dosa karena praktik riba tidak hanya merugikan satu orang saja, tetapi dapat meruntuhkan perekonomian yang dapat merugikan seluruh warga masyarakat (Tarigan, 2015).

Secara umum, Al-Quran mengungkapkan dua persyaratan untuk keabsahan transaksi yang diberikan yaitu, dibolehkan dan tidak berbahaya. Kebolehan berarti bahwa komoditas dan layanan tersebut harus diperbolehkan oleh Syariah (hukum Islam) sementara tidak berbahaya berarti bahwa komoditas atau layanan tidak harus berbahaya bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah transaksi tersebut

dilakukan dalam perdagangan tradisional atau elektronik, kedua prasyarat di atas harus dipenuhi oleh semua pelaku transaksi. Sejak e-commerce dilakukan, layanan berbasis computer dan internet menjadi poin yang fundamental. Ustadz Mustafa Omar, beliau menyebutkan bahwa konsep perdagangan dalam Islam secara umum tidak bertentangan e-commerce bahkan mendorong e-commerce sebagai salah satu cara baru melakukan bisnis. Dijelaskan pula bahwa secara tradisional, bisnis dilakukan secara lisan tatap muka tetapi hari kedua pihak kontraktor yang terhubung bersama-sama melalui komputer. Namun, Hussin menambahkan bahwa apa yang banyak dari persetujuan dalam melakukan e-commerce adalah perspektif moral yang mengarah ke pedagang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Dengan demikian, beberapa isu-isu Syariah dapat direferensikan sambil membahas beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip etika dalam bisnis syariah (Amiruddin, 2016).

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para Ulama, Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari (Ahmad, 2016). Pelaksanaan As-Salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan

pembayaran kontan dimajlis akad. Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

1. Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga As-Salaf.
2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad As-Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Hukum dasar dari muammalah menurut Islam, bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek

transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa (Ahmad, 2016). Dalam Islam kita juga diajarkan berbisnis yang baik dan benar, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An Nisa Ayat 29: ٥

عَنْ تِجَارَةٍ كُنْوَ تَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَىٰ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An Nisa : 29).

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar (hak). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara' (Tarigan, 2015). Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya

terdapat unsur *Maghrib* yang merupakan singkatan dari maisir, gharar, riba dan batil itu sendiri lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari’, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya (Tarigan, 2015).

2.2.4 Pengukuran Indikator *Smart Economy*

1. Jumlah Lulus Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003:20). Proses pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mentransfer dan membimbing para penerus bangsa. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam proses pendidikan adalah guru. Proses untuk menghasilkan guru dilaksanakan di perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita (Harsono, 2018:22). Menurut Sudiyono (2004:23), bahwasanya pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik dan profesional. Sementara pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik dan politeknik, sekolah tinggi institut dan universitas.

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia terdiri dari tiga kategori, yaitu : Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi

Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Lembaga pendidikan tersebut berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi. Terdiri dari Strata satu (SI) bergelar Sarjana, Diploma I dan II bergelar A.Ma, Diploma III bergelar A.Md, Starata dua atau pasca sarjana (S2) bergelar Magister, dan Strata tiga (S3) bergelar Doktor (DR) (Taliziduhu, 2018:39).

Hakikat perguruan tinggi yaitu sebagai proses belajar mengajar adalah berusaha mencari informasi dan pengetahuan serta mengajar. Perguruan tinggi sebagai proses belajar mengajar yang berarti berusaha memperoleh pengetahuan dan perilaku yang benar tentang sesuatu dari lingkungannya. Sedangkan mengajar adalah mengkomunikasikan pengetahuan dan perilaku tadi kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain mampu mengembangkan lebih lanjut.

Dari penjelasan diatas maka jumlah perguruan tinggi merupakan gejala kota, yang identik dengan kemoderenan dan lebih menekankan pendekatan yang bersifat liberal. Peranan perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dipandang potensial dan sangat menentukan. Masalah yang perlu dicermati adalah sudah sejauh mana perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan fropesional pada bidang yang ditekuni membincangkan lulusan yang mandiri dan fropessional adalah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dalam hal bagaimana mengolah dan memanfaatkan program dan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan

kemahasiswaan secara optimal. Antara lain adalah mengolah dan memanfaatkan tenaga pembimbing kemahasiswaan,waktu, diluar kegiatan akademik ,menyusun program dan kegiatan berkualitas, menyusun pembiayaan yang memadai dan sarana prasarana. Apabila hal tersebut di atas dikelola secara fropessional akan mampu menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan dengan sendirinya akan meluluskan lulusan yang mandiri dan fropessional.keberhasilan suatu perguruan tinggi dapat diukur atau lebih ditentukan oleh kemampuan menciptakan mahasiswa/I sebagai pencari kerja (Malik Fadjar, 2005:258).

Menurut Sudiyono (2004) jumlah lulus pendidikan tinggi diukur dengan rumus :

$$JLPT = \frac{\text{Jumlah Lulus Pendidikan Tinggi}}{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}} \times 100 \%$$

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 224, dari Anas bin Malik ra, yang dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jaami ash-Shaghir No. 3913 yang artinya Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (al-Qazwani, 2000). Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimat memiliki makna tersendiri dalam kehidupan. Orang yang menuntut ilmu dan memiliki ilmu pengetahuan akan menjadi lebih baik dan bermartabat bahkan diangkat Allah derajatnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Mujadalah : 11)

Allah memuji dan memotivasi hambanya untuk berilmu dan terus membekali dirinya dengan terus mengisi diri dengan ilmu. Nabi Muhammad dalam hadisnya memberi kabar gembira dan ganjaran selama seseorang menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan Muslim :“dari Abu Hurairah berkata, Rosullaulah bersabda barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga

Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (*long life education*). Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu (pendidikan) bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan

ukhrowi saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan duniawi juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini.

2. Jumlah Pengguna Jaringan Internet

Sejak menjadi ajang eksplorasi oleh para ahli, kita dapat menggali banyak alternatif solusi dari teknologi internet. Khususnya di bidang pendidikan berbagai peluang telah tercipta. Dalam hal ini pengertian Internet, Oetomo menjelaskan, “International Network (Internet) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia”. Sedangkan menurut Pratama menjelaskan, “Internet merupakan sistem jaringan dari ribuan bahkan jutaan komputer yang ada di dunia ini”. Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, karena tak satu pihakpun yang mengatur dan memilikinya.

Pengguna jaringan Internet Menurut Sulianta yang di kutip oleh Rusno adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jutaan perangkat computer yang terhubung melalui suatu protocol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer. Semua komputer yang terhubung ke internet melakukan pertukaran informasi melalui protocol yang sama, yaitu dengan cara TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) (Munir, 2019).

Di samping itu, Pengguna jaringan Internet juga mencakup perangkat lunak yaitu berupa data yang di kirim dan di simpan

yang sewaktu – waktu dapat diakses. Istilah Internet pada mulanya di ciptakan oleh para pengembangannya karena mereka memerlukan kata yang dapat menggambarkan jaringan dari jaringan-jaringan yang saling terkoneksi yang tengah mereka buah waktu itu. Internet merupakan kumpulan orang dan komputer di dunia yang seluruhnya terhubung oleh bermil-mil dan saluran telepon.

Internet Berasal dari kata *International Networking* atau net adalah kumpulan luas dari jaringan computer yang saling terhubung di seluruh dunia, mulai dari komputer kecil (Personil Computer/PC) di rumah-rumah sampai computer besar di perusahaan-perusahaan. Definisi lain adalah, internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (*Internet Addres*) yang dapat di gunakan untuk berkirim surat atau informasi. Fasilitas internet yang paling terkenal, *World Wide Web* (WWW), adalah bagian internet yang relative baru, sedangkan fungsi seperti mengirim dan menerima Electronic Mail (E-Mail) sudah dimanfaatkan orang selama lebih dari 30 tahun (Deni, 2012).

Menurut Arief (2019), internet adalah “sistem komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet menggunakan *protocol standart* TCP/IP (*Transmission Control Protokol/Internet Protokol*) yang berfungsi untuk

menghubungkan semua jenis, tipe dan *system computer* yang ada di seluruh dunia agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain.”

Jadi definisi internet adalah jaringan computer terbesar menghubungkan jutaan komputer yang tersebar antar kota, antar provinsi, antar Negara dan bahkan di seluruh penjuru dunia. Untuk menghubungkan pada internet, seorang anggota jaringan harus mengirim dan menerima paket data dengan fasilitas EMail. Bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta.

Menurut Arief (2019) jumlah pengguna jaringan internet diukur dengan rumus :

$$JPJI = \frac{\text{Jumlah pengguna jaringan internet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Al-Quran sudah Allah katakan di dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dari ayat tersebut beberapa ulama memberikan penafsiran yang beragam tentang ”peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Sufyan As-Sauri menafsirkan makna yang dimaksud dalam perintah tersebut adalah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali Ibnu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas

sehubungan dengan makna “peliharalah” adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah SWT dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah SWT, serta perintahkanlah keluarganya berdzikir dan mengingat, niscaya Allah SWT akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka.

3. Dana Pihak Ketiga Perbankan

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperbolehkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Sedangkan menurut Darmawi (2011:45), dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat atau dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak

ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai suatu sumber dana yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat dan merupakan jumlah terbesar yang paling diandalkan oleh setiap bank.

Menurut Kasmir, (2016) Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat diukur dengan rumus:

$$\text{DPK} = \frac{\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa pengukuran dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(Nya) (Q.S, Yunus:55)*

Ayat di atas jelas memberikan pemahaman bahwa segala apa yang ada dalam bumi ini merupakan kepemilikan Allah SWT. Jadi pemahaman yang sewajarnya muncul adalah dalam pengelolaan asset itu harus sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh sang pemiliknya atau yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang sewajarnya yaitu terhadap Allah, Manusia, dan Alam

Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan dana dari sumber lainnya dan pencarian dana maka dalam Islam juga mengatur tentang dana simpanan, dimana lembaga penyimpanan menyediakan sarana untuk menyimpan kekayaan (uang) diharuskan merujuk kepada prinsip Amanah sebagai nilai dasarnya, sehingga pemilik harta bisa mempercayai sarana/lembaga tersebut untuk menyimpan harta mereka. Dijelaskan lebih jauh bahwa setiap pelaksanaan dilarang melakukan penipuan dan kecurangan sehingga pengelolaan Dana Pihak Ketiga harus memiliki sifat Amanah, dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat

yang terbaik dalam segala hal apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

4. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan sejumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui melalui PDRB atas harga berlaku. Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas harga dasar konstan. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB, (Bank Indonesia, 2020).

Domestik/regional merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa

dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarah pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya

pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 2017).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Dalam menghitung angka-angka PDRB menggunakan metode tidak langsung ini alokator yang dapat dipakai didasarkan pada (1) Nilai produksi, (2) Jumlah produksi, (3) Tenaga kerja, (4) Penduduk, (5) Alokator lainnya yang dianggap sesuai dengan daerah tersebut.

Menurut Kuncoro, (2004) PDRB Perkapita dapat diukur dengan rumus:

$$\text{PDRB Perkapita} = \text{Total PDRB} / \text{Total Jumlah Penduduk}$$

Islam dalam arti sistem ekonomi (nidhom al-iqtishad) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia pada real welfare atau falah, kesejahteraan yang sebenarnya. Falah mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Sehingga tidak hanya kesejahteraan dunia saja yang mencakup jasadiyah dan ruhaniah saja yang akan didapat tetapi juga kebaikan akhirat sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: ”Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 201)

Untuk mencapai falah dalam perekonomian, maka perlu adanya suatu motor penggerak yakni salah satunya adalah sektor produksi, baik barang maupun jasa. Sektor produksi menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Produksi dalam Islam, selain memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, juga penting memasukkan instrumen lain seperti zakat, wakaf dan sedekah dalam perhitungannya. Jadi PDRB dalam perspektif ekonomi Islam dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk fisik semata, namun juga ada perbaikan dalam moralitas masyarakat suatu daerah

5. UMKM

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan omset tahunan penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia. Terdapat beberapa definisi mengenai usaha mikro kecil dan menengah.

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014): Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara indonesia, yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan

usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d Rp 500.000.000) dan non manufaktur (Rp 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan UMKM adalah usaha orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

Menurut Kuncoro, (2004) UMKM dapat diukur dengan rumus:

$$\text{UMKM} = \frac{\text{Jumlah Unit UMKM}}{\text{Total Penduduk}} \times 1000$$

Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

- e. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dalam Islam kita juga diajarkan berbisnis yang baik dan benar, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Q.S. Al Jumu'ah : 10)

Al-Syaukani menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan (tijarat) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupanmu. Dan carilah karunia Allah dalam bentuk rizqi yang memang dikaruniakan Allah buat hambanya. Dalam konteks ayat, fadhl Allah adalah keuntungan-keuntungan di dalam mu'amalat dan usaha-usaha (makasib) yang telah kita lakukan

Ayat di atas menjelaskan Allah Swt memerintahkan kepada umat muslim untuk menyebar untuk melakukan kegiatan muamalah (berdagang).. Menurut ayat di atas salah satu cara untuk berniaga dengan kita membuka usaha yang dimana dengan membuka usaha kita bisa menjalankan transaksi jual beli

sebagaimana yang di perintahkan dalam ayat tersebut tetapi harus di ingat perniagaan yang kita jalankan harus sesuai dengan prinsip yang di dasari oleh suka sama suka dan saling merelakan serta sesuai dengan ketentuan syariah. Kita bisa mulai dari usaha rumahan bahkan usaha yang berskala besar sehingga bisa menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Ekonomi cerdas atau *Smart Economy* adalah sebagai berikut:

1. Inovasi
2. Kompetisi ekonomi sebagai inovasi
3. Kewirausahaan
4. Merek dagang
5. Keproduktifan,
6. Fleksibilitas dari sisi pasar tenaga kerja serta penggabungan dalam pasar internasional.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas, seperti semangat berinovasi, kewirausahaan, citra ekonomi dan merek dagang, produktivitas, fleksibilitas dari pasar tenaga kerja, serta kemampuan untuk melakukan perubahan.

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu panduan ketika peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari

penelitian sebelum peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi bahan kajian bagi penelitian peneliti. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal dan skripsi terkait penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, (2017), dengan judul *Model Sistem Dinamik Untuk Pengembangan Smart Economy (Studi Kasus: Kota Surabaya)*. Hasil menunjukkan bahwa Hasil menunjukkan bahwa dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk *Smart Economy* sebagai langkah kota Surabaya menuju smart city. Persamaan penelitian adalah menggunakan metode kuantitatif dan *Smart Economy*. Perbedaannya adalah penulis membahas Perbedaannya adalah penulis membahas *Smart Economy* dan PAD menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti lain hanya membahas pengembangan kebijakan untuk *Smart Economy*.

Oktaviyani & Nugraha, (2018) melakukan penelitian dengan judul *Pelaksanaan Program Smart City DI Kota Magelang (Studi Kasus BAPPEDA Kota Magelang)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa konsep smart city di Kota Magelang baru diterapkan 3 tahun terakhir ini, namun perestasi Kota Magelang sangat baik terutama dalam perubahan kota. Dalam pelaksanaannya, Kota Magelang telah memiliki perububahan dalam layanannya, serta telah adanya aplikasi layanan yang dibuat

oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat ego sektoral yang merupakan masalah atau kendala yang belum terselaikan sampai sekarang sehingga Kota Magelang masih dalam proses mewujudkan konsep smart city yang sebenarnya.

Utum Nimiangge, (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pajak Daerah Dan Jumlah Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nduga Tahun 2009 -2018. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Hasil menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda (R^2) diperoleh sebesar 0.984, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sebesar 98.4%, sedangkan sisanya 1.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Kartika, (2015) melakukan penelitian dengan judul Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Analisis secara kuantitatif menggunakan

model ekonometrika yaitu regresi berganda dengan unbalanced panel data, yang diolah dengan menggunakan program Eviews 6. Hasil menunjukkan bahwa Pertama, terdapat perbedaan dalam kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, sehingga menyebabkan upaya PAD pun berbeda. Kedua, secara rata-rata pada Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Barat, DAU dan DBH Pajak (*unconditional transfers*) serta pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, secara rata-rata pada Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, DAK (*conditional transfers*) berpengaruh negatif signifikan terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah.

Elly, (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh pendapatan perkapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun sebelumnya terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dari model fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat. Kedua, Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh paling elastis dan besar terhadap Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. Adapun hasil deskripsi penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti an (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firmansyah, (2017)	Model Sistem Dinamik Untuk Pengembangan Smart Economy (Studi Kasus: Kota Surabaya)	Hasil menunjukkan bahwa dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk Smart Economy sebagai langkah kota Surabaya menuju smart city	persamaan penelitian adalah menggunakan metode kuantitatif dan Smart Economy	Perbedaannya adalah penulis membahas Smart Economy dan PAD menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti lain hanya membahas pengembangan kebijakan untuk Smart Economy.
2	Oktaviyani & Nugraha, (2018)	Pelaksanaan Program Smart City DI Kota Magelang (Studi Kasus BAPPEDA Kota Magelang)	Hasil menunjukkan bahwa konsep smart city di Kota Magelang baru diterapkan 3 tahun terakhir ini, namun perestasi Kota Magelang sangat baik terutama	persamaan penelitian adalah variabel Smart Economy	Perbedaannya adalah penulis membahas Smart Economy dan PAD menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti hanya

No	Nama Peneliti an (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dalam perubahan kota		meneliti tentang pelaksanaa n Smart Economy di Kota Magelang
3	Utlum Nimian gge, (2021)	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pajak Daerah Dan Jumlah Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupate n Nduga Tahun 2009 - 2018	Hasil menunjukka n bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik	persamaan penelitian adalah menggunakan regresi linier berganda dan variabel Pendapatan Asli Daerah	Perbedaa nnya adalah penulis membahas <i>Smart Economy</i> dan PAD menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti lain hanya membahas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Perkapita saja.
4	Kartika, (2015)	Transfer Pusat dan Upaya	Hasil menunjukka n bahwa	persamaan penelitian adalah	Perbedaa nnya adalah

No	Nama Peneliti an (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pendapat an Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat)	terdapat perbedaan dalam kapasitas PAD Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Barat	menggunakan metode kuantitatif dan variabel PAD	penulis membahas <i>Smart Economy</i> dan PAD perkapita menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti hanya meneliti tentang PAD saja.
5	Elly, (2013)	Pengaruh pendapat an perkapita dan pendapat an asli daerah (PAD) tahun sebelumnya terhadap realisasi pendapat an asli daerah	Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan	persamaan penelitian adalah menggunakan regresi linier berganda dan variabel Pendapatan Asli Daerah perkapita	Perbedaannya adalah penulis membahas <i>Smart Economy</i> dan PAD prkapita menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti lain hanya

No	Nama Peneliti an (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		(PAD) Kabupaten Kutai Barat	Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat. Kedua, Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh paling elastis dan besar terhadap Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat.		membahas Pengaruh relisasi dan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Perkapita saja.

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh jumlah lulusan perguruan tinggi terhadap Pendapatan (PAD)

Jumlah lulusan perguruan tinggi merupakan faktor penting untuk lulusan perguruan tinggi terhadap PAD Perkapita, adapun yang dimaksud dengan lulusan perguruan tinggi merupakan pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang.

Kaitan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan pendapatan perkapita (PAD), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik yang diperlihatkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan (Harsono, 2018: 22). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo,Sukarno, dkk. 2020) mengemukakan bahwa tuntutan pemerataan akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan sumber daya manusia di seluruh lapisan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqram (2019) menunjukkan hasil bahwa pendidikan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan di Provinsi Bali. Hal yang sama juga diteliti oleh (Oktaviyani & Nugraha, 2018) menunjukkan hasil bahwa konsep *smart city* di Kota Magelang baru diterapkan 3 tahun terakhir ini, namun perestasi Kota Magelang sangat baik terutama dalam perubahan kota dan pendapatan perkapita (PAD)

2.4.2 Pengaruh jumlah pengguna jaringan internet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penggunaan internet menghasilkan pengguna yang memungkinkan satu individu untuk terhubung dengan satu atau lebih individu lainnya baik untuk berkomunikasi, menerima serta menyebarkan informasi. Dimana pengguna internet merupakan komponen penting dari *marketplace* di era ekonomi digital saat ini.

Pemerintah harus terus membangun infrastruktur yang menghubungkan manusia dengan internet dan meningkatkan kualitasnya.

Kaitan Penggunaan internet dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kualitas jaringan internet seperti biaya penggunaan dan kecepatannya untuk mendownload dan mengupload, maka masyarakat dapat diuntungkan diuntungkan, sehingga akan meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 4 Kota dalam Provinsi Aceh. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rudra& Bagchi, 2018) yang menunjukkan bahwa pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2021) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi dan Komunikasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Banten tahun 2015-2019.

2.4.3 Pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Secara teoritis kenaikan dana pihak ketiga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka akan semakin tinggi pula tabungan

yang dilakukan oleh sektor Rumah tangga yang bisa dikelola oleh Lembaga penyimpanan uang (Bank). Jadi pendapatan adalah faktor penentu yang utama masyarakat menyimpan dananya di bank, pada saat ini banyak pilihan produk Dana Pihak Ketiga yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat, jadi masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan penelitian oleh (Rifai,Wijaya,dkk, 2021) menunjukkan hasil dana pihak ketiga berpengaruh Positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat,irwansyah, 2020) menunjukkan hasil bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap produk Domestik bruto (PDB)/ pertumbuhan ekonomi di indonesia

2.4.4 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel yang sering digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kapasitas pajak karena mencerminkan dasar pajak (tax base) negara/daerah (Suparmoko, 2002). Peningkatan jumlah PDRB 4 Kota dalam provinsi Aceh mencerminkan bahwa keadaan pendapatan daerah masyarakat 4 Kota dalam Provinsi Aceh semakin baik. Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita Aceh juga tentunya akan mengalami peningkatan.

Kaitan PDRB Perkapita dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana semakin memberikan kepercayaan kepada 4 Kota dalam provinsi Aceh untuk menyimpan sebagian pendapatannya

dalam bentuk simpanan. Oleh karena terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan perkapita dengan kapasitas PAD, berarti jika PDRB perkapita mengalami kenaikan maka akan berdampak pula pada kenaikan kapasitas PAD yang diproksi dengan rasio PAD terhadap PDRB atau dapat dikatakan bahwa kenaikan PDRB perkapita dapat menstimulus kapasitas PAD. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muid, 2015) menunjukkan hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik. Dan menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Hernawati, 2019) menunjukkan hasil PDRB berpengaruh positif tapi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone. Dan juga Hasil penelitian yang dilakukan (Shaulim, 2022) dengan judul "Pengaruh Hasil Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten Bengkayang)" menunjukkan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten bengkayang.

2.4.5 Pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

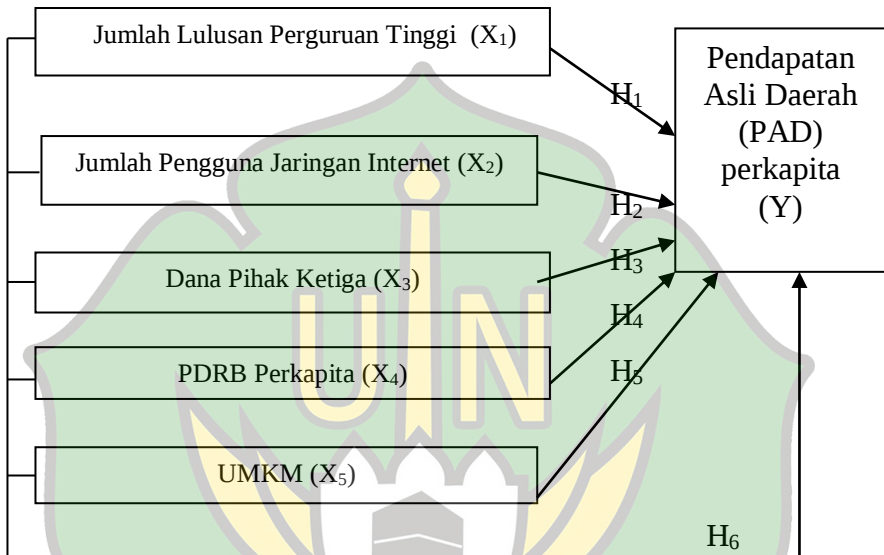
Kaitan UMKM dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Maka oleh karena itu, dalam penelitian ini UMKM yaitu Ekonomi makro sangat berdampak pada jumlah

pendapatan yang didalamnya terdapat kesejahteraan masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri bisa menjadi lebih baik jika memanfaatkan digitalisasi pada era sekarang untuk perkembangan ekonomi itu sendiri yang menghasilkan berbagai platform digital sebagai terciptanya peningkatan ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi untuk tumbuh cepat hingga ke tahap ekspor. Hasil Penelitian dari Lutfyah, L. (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Usaha Mikro Kecil Menengah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan artinya semakin tinggi UMKM maka Pendapatan Asli Daerah semakin rendah. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Simangunsong, 2022) yang berjudul “Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” menunjukkan hasil bahwa jika UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ini Indonesia tahun 2010-2018.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2017) menunjukkan hasil dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk *Smart Economy* sebagai langkah kota menuju smart city. Hal yang sama juga diteliti oleh (Wulandari et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa UMKM berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun skema keterkaitan antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1
Skema Pengaruh Antar Variabel



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Skema Gambar 2.1, dapat diketahui bahwa yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh jumlah lulusan perguruan tinggi, jumlah pengguna jaringan internet, Dana pihak ketiga, PDRB Perkapita dan UMKM terhadap PAD perkapita di 4 Kota dalam Provinsi Aceh. Maka dalam penelitian ini terdapatnya dua variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah jumlah lulusan perguruan tinggi, jumlah

pengguna jaringan internet, Dana pihak ketiga, PDRB Perkapita dan UMKM (X).

2. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perkapita (Y).

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu di uji dan di tes kebenarannya dengan data lapangan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang di ajukan sebagai dugaan awal adalah sebagai berikut :

- H₁: Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh
- H₂: Jumlah Pengguna Jaringan Internet secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.
- H₃: Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.
- H₄: Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.
- H₅: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.

H₆: Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi, penggunaan jaringan internet, dana pihak ketiga, PDRB perkapita dan UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Creswell, 2016). Penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan masalah dan mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang berupa data sekunder.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* atau *confirmatory*. Penelitian *explanatory* (penjelasan) merupakan penelitian yang menyoroti pengaruh antar variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis (Arikunto, 2016).

3.2 Jenis Data Dan Teknik Perolehan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (Hermawan, 2005:168). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Banda Aceh. Data tersebut bersumber

dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Smart Economy* dalam bentuk data panel. Data panel merupakan data yang terdiri dari kombinasi data time series dan data *cross-section*. Dengan kata lain, data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Nuryanto, 2021). Adapun objek dalam penelitian ini adalah 4 Kota dalam Provinsi Aceh yang terdiri dari Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa dengan rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah data sebanyak 10 tahun.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2008:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek obyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dapat dipelajari sehingga kemudian dapat ditarik untuk kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Kota yang ada di Provinsi Aceh yang memiliki 23 kabupaten/Kota pada tahun 2011-2020.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi Sugiyono, (2008:118). Cara yang digunakan dalam

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*.

Sampel yang digunakan peneliti hanya 4 Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2011-2020. Alasan mengambil 4 Kota hal ini disebabkan karena dalam provinsi Aceh hanya Kota saja yang ada *Smart Economy*, sehingga penulis memilih 4 kota saja.

Sampel dalam penelitian ini adalah 4 Kota yang ada di Provinsi Aceh pada tahun 2011-2020, dikarenakan dari 5 Kota yang ada di Provinsi Aceh hanya 4 Kota yang tersedia seluruh sampel yang diperlukan guna penelitian ini. Sampel dipilih secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketentuan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ketentuan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Daftar Kota di Provinsi Aceh yang Menjadi Sampel

No	Kota
1	Kota Banda Aceh
2	Kota Sabang
3	Kota Lhokseumawe
4	Kota Langsa

Sumber: Badan Statistik Provinsi Aceh, 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan teknik pengumpulan data, maka dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Kota dalam Provinsi Aceh, landasan teori

dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas.

2. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data retribusi SMART ECONOMY, pendapatan asli daerah sepuluh tahun terakhir di Kota terkait.

3.5 Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2013:31) menjelaskan operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Smart Economy* (X).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah pemasukan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dinyatakan dalam jutaan rupiah tahun 2011-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. *Smart Economy* (X)

Smart Economy adalah ekonomi yang mana ditandai dengan karakteristik sebagai berikut : inovatif, produktif, digital, integral green, bertanggung jawab secara sosial, jaringan dan respon yang cepat. Variabel *Smart Economy* dalam penelitian ini dinyatakan adalah:

- 1) Pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita (Harsono, 2018: 22).
- 2) Pengguna jaringan Internet Menurut Sulianta (2016) adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang

terdiri dari jutaan perangkat computer yang terhubung melalui suatu protocol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer.

- 3) Menurut Rivai dan Arifin (2010:579) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperbolehkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
- 4) Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah.
- 5) Usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan omset tahunan penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang	$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain}$	PAD Perkapita

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
	bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.	PAD yang sah/Total Jumlah Penduduk Sumber: Kasmir, (2016)	
Jumlah Lulus Pendidikan Tinggi (X ₁)	Pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita (Harsono, 2018: 22).	JLPT = $\frac{\text{Jumlah Pendidikan tinggi}}{\text{jumlah penduduk bersekolah}} \times 100 \%$ Sudiyono (2004)	Rasio
Jumlah Pengguna Jaringan Internet (X ₂)	Pengguna jaringan internet Menurut Sulianta (2016) adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jutaan perangkat computer yang terhubung melalui suatu protocol tertentu untuk pertukaran	Jumlah pengguna jaringan internet Sumber: Arief (2019)	Rasio

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
	informasi antar komputer.		
Dana Pihak Ketiga (X3)	Menurut Rival dan Ariffin (2010:579) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperbolehkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.	Total Giro + Tabungan Penduduk Sumber: Kasmir, (2016)	DPR Deposito/Totalm per kapita
PDRB Perkapita (X4)	Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah.	$PDRB \text{ Perkapita} = \frac{\text{Total PDRB}}{\text{Total Penduduk}}$ Sumber: Kuncoro, (2004)	PDRB per Kapita
UMKM (X5)	UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp	$UMKM = \frac{\text{Total Unit}}{\text{Total Penduduk} \times 1000}$ Sumber: Amri, (2023)	Unit/1000 jumlah Penduduk

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
	200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan omset tahunan penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia. Terdapat beberapa definisi mengenai usaha mikro kecil dan menengah.		

3.6 Metode dan Analisis Data

3.6.1 Regresi Data Panel

Penelitian ini melibatkan data yang bersifat *time series* (runtun waktu) dan *cross section* (lintas bagan). Sifat *time series* terlihat dari diambilnya kurun waktu 10 tahun dari tahun 2011-2020, sedangkan *cross section* terlihat dari data 4 kota dalam Provinsi Aceh yang dijadikan sebagai wilayah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, Agar koefisien estimasi yang diprediksi melalui regresi panel dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas masing-masing dimensi terhadap Pendapatan Asli Daerah, seluruh variabel kemudian ditransformasikan dalam bentuk bentuk logaritma, maka analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan ersamaan regresi data

panel sebagai berikut:

$$\text{Log PAD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log JLT}_{it} + \beta_2 \text{Log JPI}_{it} + \beta_3 \text{Log DPK}_{it} + \beta_4 \text{Log PDRB}_{it} + \beta_4 \text{Log UMKM}_{it} + \Sigma \dots (3.1)$$

Keterangan:

IP	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a	: Konstanta
b ₁	: Koefisien regresi
JLPT	: Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi
JPJI	: Jumlah Pengguna Jaringan Internet
DPK	: Dana Pihak Ketiga
PDRB Perkapita	: Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
Σ	: Error Term

Teknik pengolahan data menggunakan program *Eviews9*. *Eviews* merupakan software untuk analisis statistika dan ekonometrika. *Eviews* dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi data ilmiah analisis keuangan, peramalan makroekonomi, simulasi, peramalan penjualan dan analisis biaya (Sugiono, 2015:221).

Analisis data dengan metode regresi data panel harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu untuk mengestimasi model yang sesuai. Ada tiga jenis pendekatan yang harus dilakukan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model CEM digunakan sebagai pendekatan model data panel yang sangat sederhana karena berupa kombinasi data time

series dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan untuk estimasi koefisien digunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square*.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Asumsi Model FEM bahwa perbedaan antara unit dapat diketahui melalui perbedaan konstantanya. Model FEM, estimasi dapat dilakukan tanpa *no weighted* atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan juga *cross section weight* atau *Generalized Least Square* (GLS).

3. *Random Effect Model* (REM)

Random effect model bertujuan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect* yang menggunakan variabel semu, sehingga terjadi ketidakpastian dalam model. Ketika tidak terdapat variabel semu, maka *random effect* akan menggunakan residual, dengan asumsi memiliki hubungan antar waktu dan objek. Model pendekatan REM digunakan untuk menghilangkan heteroskedastisitas pada model. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).

3.6.2 Pengujian Model

Penentuan model regresi data panel yang sesuai dilakukan dengan pengujian penelitian ini yaitu:

1. *Uji Chow*

Uji chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam estimasi yaitu model FEM atau CEM. *Uji*

Chow dapat dilakukan dengan *uji restricted F-test*. Hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Common Effect model*

Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas *cross-section F*. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 5% (0,05) (*cross-section F* > $\alpha = 0,05$) maka terima H_0 sehingga metode yang lebih baik digunakan adalah *common effect model* (CEM), namun sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (*cross-section F* < $\alpha = 0,05$), maka tolak H_0 sehingga metode yang digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan yaitu antara FEM atau REM. Adapun uji hipotesis untuk pemilihan model pada uji Hausman, yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Random Effect Model*

Keputusan penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas chi square. Adapun kriteria keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas chi square < $\alpha = 0.05$ maka tolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*

b. Apabila nilai probabilitas chi square $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *random effect*.

3.7 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua pengujian yaitu, menggunakan uji-t untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen dan menggunakan uji-F untuk melihat pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun model pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Parsial (Uji-t)

H_{01} Jika $\beta_1 = 0$; dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak artinya Jumlah lulusan tinggi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{a1} Jika $\beta_1 = \beta_1 \neq 0$ ($\beta_1 \neq 0$); dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak artinya jumlah lulusan tinggi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Aceh.

H_{02} Jika $\beta_2 = 0$; dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak artinya Jumlah Pengguna Internet tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{a2} Jika $\beta_2 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_2 \neq 0$); dan nilai probabilitas $t >$ nilai

kriteria , maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak artinya Jumlah Pengguna Internet berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{03} Jika $\beta_3 = 0$; dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak artinya Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{a3} Jika $\beta_3 \neq 0$ ($\beta_3 \neq 0$); dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria , maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak artinya Dana Pihak ketiga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh

H_{04} Jika $\beta_4 = 0$; dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak artinya Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{a4} Jika $\beta_4 \neq 0$ ($\beta_4 \neq 0$); dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria , maka H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak artinya Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{05} Jika $\beta_5 = 0$; dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria, maka H_{05} diterima dan H_{a5} ditolak artinya Usaha Mikro Kecil Menengahn tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

H_{a5} Jika $\beta_5 \neq 0$ ($\beta_5 \neq 0$); dan nilai probabilitas $t >$ nilai kriteria , maka H_{a5} diterima dan H_{05} ditolak artinya

Usaha Mikro Kecil Menengah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Di Provinsi Aceh.

3.7.2 Uji Simultan (Uji-F)

H_{06} : Jika $\beta_1 = \beta_2 = 0$; dan nilai probabilitas $F >$ nilai kriteria, maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak artinya Jumlah lulusan Tinggi, Jumlah Pengguna Internet, Dana Pihak Ketiga, PDRB dan UMKM secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.

H_{a6} : Jika $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_1 \neq 0$); dan nilai probabilitas $F >$ nilai kriteria, maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak artinya Jumlah lulusan Tinggi, Jumlah Pengguna Internet, Dana Pihak Ketiga, PDRB dan UMKM secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4 Kota Dalam Provinsi Aceh.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Kuncoro (2013:246) Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi / R^2 berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas

dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada penambahan variabel independen maka R^2 pasti akan meningkat tanpa mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah model adjusted R^2 . Model adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian variabel penelitian ini terdiri dari Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi (JLT), Jumlah Pengguna Internet (JPI), Dana Pihak Ketiga (DPK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder pada bentuk data panel selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2011-2020 dengan tujuan dari penelitian untuk mendapati apakah variabel-variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Informasi statistic berkaitan dengan pengaruh PAD terhadap *Smart Economy* pada 4 kota di Aceh dapat di lihat dari hasil statistic deslriptif seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskripsi

	PAD (Rp per kapita)	JLT (persen)	JPI (persen)	DPK (Rp per kapita)	PDRB (Rp per kapita)	UMKM (unit / 1000 penduduk)
Mean	693.585	20.66	41.89	5.298.904	3.749.827	28
Median	694.998	21.05	38.54	3.0498.608	3.296.000	25
Maximum	1.701.259	36.86	76.27	17.000.000	7.315.817	67
Minimum	106.515	9.39	17.87	8.195.543	1.831.771	4
Std. Dev.	420.995	7.320	16.83	4.870.686	1.461.619	19
Skewness	0.601394	0.205588	0.331229	1.281500	0.964870	0.719967
Kurtosis	2.577900	2.217458	1.975438	3.486894	2.893078	2.450932
Observations	40	40	40	40	40	40

Sumber :Hasil Pengolahan Eviews 9.

Dari hasil observasi sebanyak 40 pengamatan, didapatkan dari 4 sampel atau objek yaitu Kota di Provinsi Aceh dikalikan periode penelitian selama 10 tahun yaitu 2011-2020. Dalam Waktu 10 tahun, Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan nilai mean (nilai rata-rata) sebesar Rp 693.585 per kapita dengan angka minimum sebesar Rp 106.515 per kapita dan angka maximum sebesar Rp 1.701,259 per kapita Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar persen jumlah Pengguna Internet yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara Rp 106.515 – 1.701.259 per kapita serta angka standart deviasinya sebesar Rp. 420.995 perkapita

Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel jumlah lulusan Tingga (JLT) menghasilkan nilai mean (nilai rata-rata) variabel JLT 20.66% dari masyarakat yang bersekolah dengan angka minimum sebesar 9,39% dari masyarakat yang bersekolah dan angka maximum sebesar 36.86% dari masyarakat yang bersekolah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar persen jumlah lulusan tinggi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara 9.39%-36.86% dari masyarakat yang bersekolah, serta angka standart deviasinya sebesar 7.32% dari masyarakat yang bersekolah.

Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel jumlah lulusan pengguna Internet (JPI) menghasilkan nilai mean (nilai rata-rata) variabel JPI 41.89% dari jumlah Penduduk dengan angka minimum sebesar 17.87% dari jumlah Penduduk dan angka maximum sebesar 76.27% dari jumlah Penduduk. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar persen jumlah Pengguna Internet yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara 17.87%-76.28% dari jumlah Penduduk, serta angka standart deviasinya sebesar 16.83% dari jumlah Penduduk.

Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menghasilkan

nilai mean (nilai rata-rata) sebesar Rp 5.298.904 per kapita dengan angka minimum sebesar Rp 8.195.543 per kapita dan angka maximum sebesar Rp 17.200.000 per kapita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar jumlah dana pihak ketiga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara Rp 8.195.543 - 17.200.000 per kapita, serta angka standart deviasinya sebesar Rp 4.870.686 per kapita.

Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menghasilkan nilai mean (nilai rata-rata) sebesar Rp 3.749.827 per kapita dengan angka minimum sebesar Rp 1.831.771 per kapita dan angka maximum sebesar Rp 7.315.771 per kapita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar PDRB yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara Rp 1.831.771 -7.315.771 per kapita, serta angka standart deviasinya sebesar Rp 1.461.619 per kapita.

Hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa selama pengamatan variabel Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghasilkan nilai mean (nilai rata-rata) 28 unit/1000 penduduk dengan angka minimum sebesar 4 unit/1000 penduduk dan angka maximum sebesar 67 unit/1000 penduduk Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar persen jumlah Pengguna Internet yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara 4-67unit/1000 penduduk , serta angka standart deviasinya sebesar 19 Unit/1000 penduduk

4.2 Korelasi antar variabel

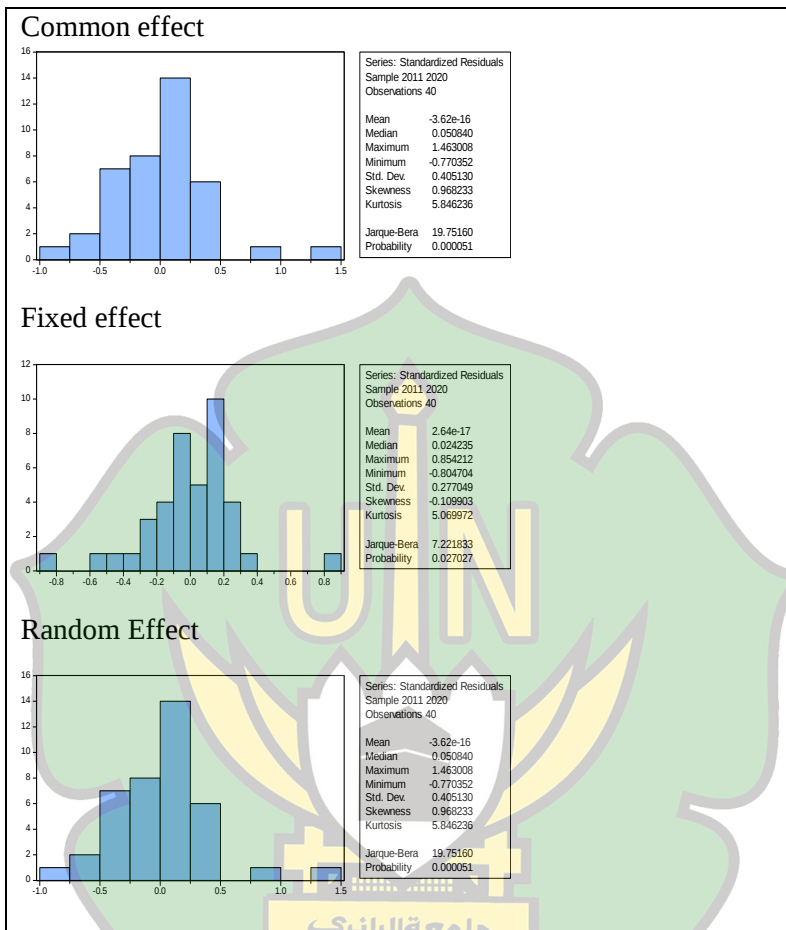
Tabel 4.2
Korelasi Antar Variabel

	PAD (Rp per kapita)	JLT (persen)	JPI (persen)	DPK (Rp per kapita)	PDRB (Rp per kapita)	UMKM (unit / 1000 penduduk)
PAD	1					
JLT	0.416	1.000				
JPI	0.350	0.946	1.000			
DPK	0.814	0.384	0.371	1.000		
PDRB	0.318	0.782	0.826	0.403	1.000	
UMKM	0.903	0.389	0.339	0.908	0.381	1

Berdasarkan Tabel 4.2 korelasi antar variabel di atas ditemukan bahwa ada nya kolerasi variabel dependen yang tinggi antara JPI dengan JLT sebesar .0.946, JPI dengan PDRB sebesar 0,826 sehingga di dapati multikolineritas, sehingga penulis mengambail Langkah untuk membuang 2 variabel yang mempunyai kolerasi yang tinggi, yaitu JLT dan PDRB.

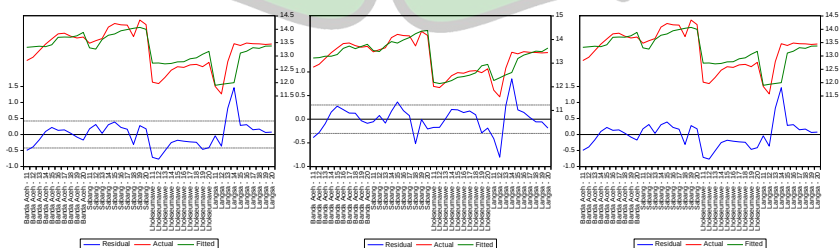
4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas residual dapat didasarkan pada pendekatan grafik dan nilai Jarque-Berra (JB) test. Jarque-Bera Test merupakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka data dikatakan berdistribusi normal (Winarno, 2015) Uji normalitas digunakan untuk mengetahui dalam variabel residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi normal pada model regresi. Mengetahui data terdistribusi normal atau tidak



Gambar 1. Normality Test

Common effect fixed effect Random effect



Gambar 2 Grafik Residual, Actual, dan Fitted Line

Dari hasil pengujian tersebut terlihat bahwa nilai Jarque Bera 7.221833 dengan probability 0,027 sehingga lebih kecil dari α 0.05, artinya residual tidak terdistribusi normal. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan adanya syarat ini sebagai sesuatu yang wajib untuk dipenuhi (Nachrowi : 2006).

Pendekatan estimasi yang paling baik adalah pendekatan yang dapat memberikan hasil paling akurat. Karena itu, akurasi dan ketepatan estimasi dapat didasarkan pada perbandingan data aktual. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa diantara ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa residual estimasi yang paling kecil di tunjukkan oleh pendekatan Fixed effect, dengan demikian analisis terhadap grafik tersebut memberikan kesimpulan yang sama dengan chow test dan Hausman test dimana Pendekatan fixed effect merupakan pendekatan terbaik di antara 2 pendekatan lainnya. Pada grafik tersebut terlihat bahwa fluktuasi fitted line (hasil estimasi), lebih mendekati data yang sebenarnya (actual line)

4.4 Uji Pemilihan model

Setelah di dapati tidak adanya lagi korelasi antar variabel yang tinggi sesama variabel dependen maka selanjutnya akan di lakukan pengujian model untuk mengetahui pengujian model mana yang terbaik digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil mengujian regresi Panel memperlihatkan hasil Chow Test dan Hausman test, Chow test menunjukkan nilai cross section F sebesar 12,521

dengan p-value sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang berarti bahwa berdasarkan tes ini, model terbaik adalah fixed-effect. Selanjutnya, hasil Haussman test menghasilkan nilai X^2 sebesar 37,564 dan nilai p-value sebesar 0,000 ($< 0,05$). Uji ini juga memperkuat bahwa pendekatan fixed-effect memberikan hasil estimasi lebih akurat dibandingkan random-effect. Karena itu, regresi panel dengan pendekatan fixed-effect diyakini lebih tepat digunakan untuk memprediksi pengaruh dari Jumlah Pengguna Internet, dana Pihak Ketiga, UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Tabel 4.3
Hasil Rergesi Panel

Endogenous variabel : Log PAD									
Effect specification of panel regression									
Variabel	Common Effect			Fixed Effect			Random Effect		
	Koefisien estimasi	T-stat	P-value	Koefisien estimasi	T-Stat	P-value	Koefisien estimasi	T-Stat	P-value
C	10,388	5,080	0,000	12,867	4,470	0,000	10,388	7,112	0,000
LJPI	0,202	1,106	0,276	0,751	2,781	0,008	0,202	1,548	0,130
LDPK	-0,003	-0,023	0,981	-0,209	-1,012	0,318	-0,003	-0,032	0,974
LUMKM	0,696	4,228	0,000	0,406	3,082	0,004	0,696	5,920	0,000
R ²	0,680			0,850			0,680		
Adjusted R ²	0,653			0,823			0,653		
F-	25,505			31,257			25,505		

statistic						
Prob(F-stat)	0,000	0,000	0,000			
DW-stat	0,762	1,218	0,726			
Residual Cross-Section Dependence Test	Chow Test			Hausman Test		
	Effect Test	Stat	P value	Test Summary	X ² stat	P value
	Cross-section F	12,521	0,000	Cross-section random	37,564	0,000
	Cross-section Chi-square	30,404	0,000			
	Breusch-Pagan LM	18,005	0,006	Breusch-Pagan LM	13,369	0,037
	Pesaran scaled LM	2,310	0,020	Pesaran scaled LM	0,972	0,330
	Bias-corrected scaled LM	2,088	0,036	Pesaran CD	2,295	0,0217
	Pesaran CD	3,892	0,000			

4.5 Analisi hasil uji regresi Data Panel

Berdasarkan hasil tabel 4.3 hasil pengolahan metode fixed effect maka di temukan hasil dari perhithungan Jumlah penggunaan Internet(JPI), DPK dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

$$Y_{it} = 12,867 + 0.751it - 0.209it + 0.406 + eit$$

Dari Model di atas dibuat interpretasi:

1. Konstanta sebesar 12,867 menunjukkan jika variabel independen (JPI,DPK dan UMKM) adalah nol, maka Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 12,867%
2. Nilai koefisien regresi Jumlah pengguna Internet(JPI) sebesar 0.751 yang berarti kenaikan jumlah pengguna internet 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan Sebesar 0,751%
3. Nilai koefisien regresi Dana Pihak Ketiga(DPK) sebesar – 0.209 yang berarti kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar –0.209%
4. Nilai koefisien regresi UMKM sebesar 0,406 yang berarti kenaikan UMKM 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 0,406%

4.6 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Data Panel

1. Uji T

Uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya, Dimana Untuk melihat besarnya pengaruh variabel secara parsial (sebagian) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila nilai probabilitas t lebih kecil dari 0.05, maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 4.3

Ha₂ : Pengujian terhadap Jumlah Pengguna Internet (LOG JPI)

Berdasarkan hasil uji T pada table di atas nilai t-statistik untuk variabel JPI adalah 2.781 dengan arah positif, sedangkan probabilitasnya $0.008 < 0.05 (\alpha)$. Hipotesis Penelitian ini adalah

H₀ : JPI tidak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha₂ : JPI berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan kriteria :

Jika Nilai signifikansi $> 0,05$ maka ha ditolak

Jika Nilai signifikansi $< 0,05$ maka Ha diterima

Berdasarkan kriteria di atas maka H₀₂ ditolak Ha₂ secara statistik JPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD empat kota di Provinsi Aceh, dengan nilai koefisien adalah sebesar 0.751.

Ha₃ : Pengujian terhadap Dana Pihak Ketiga (LOG DPK)

Berdasarkan tabel t-statistik di atas di peroleh nilai variabel DPK adalah -0.012 dengan arah negatif, sedangkan probabilitasnya $0.318 > 0.05 (\alpha)$ Hipotesis Penelitian ini adalah

H₀ : DPK tidak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha2 : DPK berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan kriteria :

Jika Nilai signifikansi $>0,05$ maka H_0 ditolak

Jika Nilai signifikansi $<0,05$ maka H_0 diterima

Berdasarkan kriteria di atas maka , H_0 diterima H_3 ditolak yang berarti secara statistik DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD empat kota di Provinsi Aceh. Dengan nilai koefisien adalah sebesar -0.209

Ha5 : Pengujian terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (LOG UMKM)

Berdasarkan hasil uji T pada tabel di atas nilai t-statistik untuk variabel UMKM adalah 3.082 dengan arah positif, sedangkan probabilitasnya $0,004 < 0,05 (\alpha)$. Hipotesis Penelitian ini adalah

H0 : UMKM tidak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha2 : UMKM berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan kriteria :

Jika Nilai signifikansi $>0,05$ maka H_0 ditolak

Jika Nilai signifikansi $<0,05$ maka H_0 diterima

Berdasarkan kriteria di atas maka H_0 ditolak H_5

Berdasarkan kriteria di atas H_0 ditolak H_5 diterima. secara statistik UMKM berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PAD empat kota di Provinsi Aceh, dengan nilai koefisien adalah sebesar 0.406.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang termasuk dalam regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada waktu yang bersama. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan (keseluruhan) mempengaruhi variabel dependennya. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila nilai probabilitas < 0.05 maka model diterima. Berdasarkan tabel 4.3 bahwa F_{hitung} sebesar 31,357 dengan Probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000. Nilai Probabilitas tersebut sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti variabel Jumlah Pengguna Internet (JPI), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan UMKM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Kota di Aceh.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Uji *R-square* ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai *adjusted R-square* yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen, Berdasarkan hasil regresi diatas besar angka *Adjusted R-square* (R^2) adalah 0.823. Hal ini menunjukkan bahwa persentase

sumbangan pengaruh variabel independent adalah sebesar 82,30%. Atau dengan kata lain variabel independent yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan sebesar 82.30% terhadap variabel dependennya, sisanya 17.70% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

4.7 Hasil dan pembahasan

1. Variabel pengguna Internet (JPI) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan koefisien 0,751, dan pengaruh tersebut signifikan dengan $p\text{-value} = 0.008(<0.05)$. Hal ini menandakan bahwa dengan banyaknya pengguna Internet dapat meningkatkan PAD dikarenakan terjadinya transaksi ekonomi berkesinambungan dengan pengguna internet tersebut baik yang menggunakan sarana HP maupun perangkat elektronik lainnya dimana sebelum terhubung internet pengguna di haruskan membeli Paket data melalaui Provider penyedia layanan intenet, serta di perumahan maupun di perkantoran untuk mengakses jaringan internet berlangganan dengan Provider untuk bisa terhubung dengan langganan Wi-fi nya. Sehingga penyedia jasa layanan untuk mengakses Internet membayarkan pajak ke pemerintah dalam bentuk Retribusi Daerah. Dengan banyaknya pengguna Internet dapat merefleksikan partisipasi Masyarakat baik dari kalangan muda hingga tua menggunakan jaringan sudah menjadi kebutuhan sekunder.

Hal ini sesuai dengan dua hasil peneliti sebelumnya yang mana sama-sama menyimpulkan bahwa Jumlah pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. variabel Dana Pihak Ketiga(DPK) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan koefisien - 0,209 dan Pengaruh tidak signifikan dengan $p\text{-value} = 0.318 > (0.05)$ hal ini mengindikasikan bahwa DPK tidak berdampak langsung terhadap PAD dikarenakan Jika dana-dana yang di peroleh dari masyarakat umum, Rumah tangga atau maupun Pemerintah hanya sebagai simpanan belaka dan tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan lain nya maka dana tersebut tidak menjadi alat pertukaran untuk perputaran ekonomi yang bisa menghasilkan PAD yang lebih tinggi. Ini juga berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang mana satu menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan juga yang kedua menyatakan DPK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbedaan dua penelitian sebelumnya dengan peneliti ini dikarenakan penulis hanya memfokuskan DPK sebagai dana yang di simpan dan tidak digunakan untuk menyalurkan pembiayaan di Lembaga pemyinpanan uang.

3. Variabel UMKM Berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan koefisien sebesar 0.406 dan berpengaruh signifikan dengan $p\text{-value}=0.004 < (0.05)$. Ini menandakan bahwa keberadaan unit usaha ini memberikan dampak yang baik bagi PAD dengan banyaknya UMKM semakin tinggi juga PAD yang bisa di peroleh oleh Pemerintah dengan sejumlah pajak dan retribusi yang disetorkan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini sama dengan satu peneliti sebelumnya yang menyatakan UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di Indonesia dan berbeda dengan satu penelitian lainnya yang menyatakan bahwa UMKM berpengaruh negatif terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Smart Economy* yang diukur dengan variabel Jumlah pengguna internet dari pembahasan di atas dijelaskan bahwa adanya kaitan antara jumlah pengguna internet terhadap pendapatan Asli Daerah yang mana dengan penggunaan internet secara merata di semua daerah mendorong pertumbuhan *marketplace* mengingat sekarang eranya ekonomi digital dan juga bisa dilihat secara parsial variabel Jumlah pengguna internet berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kota dalam Provinsi Aceh dengan nilai probabilitasnya $0.0095 < 0.05$, artinya semakin banyak jumlah pengguna internet akan semakin besar pula PAD yang bisa didapatkan karena adanya perputaran ekonomi melalui *marketplace* atau pun penyedia layanan karena membayarkan sejumlah pajak ke daerah. Menurut Perspektif Islam ini menandakan kemajuan suatu daerah yang mana jaringan internet ini kita bisa mengakses segala pengetahuan dan juga segala hal hal yang dilarang oleh Islam itu sendiri, Islam mewajibkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari dari Api Neraka dengan tidak

mengakses sesuatu yang dilarang agama pada jaringan Internet

2. Pengaruh *Smart Economy* yang diukur dengan variabel dana pihak ketiga yang mana dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa dengan bertambahnya jumlah DPK menandakan bahwa Pendapatan yang di terima masyarakat juga semakin meningkat yang mana itu berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi variabel Dana Pihak ketiga ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kota dalam Provinsi Aceh dengan nilai probabilitasnya $0.3136 > 0.10$ yang dimana jika kenaikan jumlah DPK pada perbankan tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan penulis hanya membahas dana yang di simpan oleh Lembaga resmi tanpa disalurkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk Pembiayaan kecuali dana tersebut disalurkan guna keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dan juga menurut perspektif islam dalam hakikat nya segala yang ada dimuka Bumi ini kepunyaan Allah SWT yang dimana kita harus mempertanggung jawabkan maka Lembaga resmi menyediakan menyimpan kekayaan diharuskan untuk memiliki sifat Amanah dalam menjaga kekayaan milik masyarakat dan dalam pelaksanaan nya dilarang untuk melakukan penipuan dan kecurangan.

3. Pengaruh *Smart Economy* yang diukur dengan variabel Jumlah UMKM yang mana telah dijelaskan pada pembahasan di atas semakin banyak nya jumlah Unit UMKM maka bisa dipastikan kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang mana UMKM salah satu penompang kegiatan ekonomi di suatu daerah dan secara parsial variabel UMKM berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kota dalam Provinsi Aceh dengan nilai probabilitasnya $0.0095 < 0.05$. Jika jumlah UMKM semakin banyak maka jumlah PAD yang didapat semakin tinggi juga mengingat Pelaku UMKM yang ada di berbagai sektor membayarkan kewajiban berupa pajak dll ke pemerintah setempat yang dimana bisa menaikkan jumlah PAD daerah tersebut. Dalam perspektif Islam juga di jelaskan bahwa setiap manusia di perintahkan setelah menunaikan Sholat untuk menyebar melakukan perdagangan (tjaraat) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya salah satu nya membuka usaha kerja.
4. Pengaruh *Smart Economy* (JPI,DPK dan UMKM) ketiganya secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai sebesar $0.000 < 0.05$ ini menandakan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkaitan untuk kemajuan suatu daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang lebih meningkat lagi.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah agar dapat memaksimalkan pelaksanaan *Smart economy* dilapangan guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga menghasilkan inovasi-inovasi konten bangunan, insfrastruktur dan lainnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki keterbatasan dalam hal pengambilan data. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada masyarakat 4 Kota dalam Provinsi Aceh Yaitu berdasarkan data yang diperoleh ditahun 2011-2020 hanya ada 4 kota orang yang menjadi data. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian, tidak hanya di 4 kota saja akan tetapi juga se-Provinsi Aceh. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan responden dan beberapa variabel lainnya seperti motivasi dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2016). *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 2 No 1.
- Almalia. (2017). *Strategi Pendidikan Dan Pendapatan Dalam Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Islam*". Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta.
- Atmaja, (2013). Persepsi Pengaruh Kota Pintar Terhadap Penentu Menjadi Seorang Wirausaha. Jurnal DIGIPRENEUR (Bisnis Digital, Ekonomi, dan Manajemen), Volume 03, Nomor 01.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry Dan Research Design*. University Of Nebraska, Lincoln.
- Elly, L. (2013). Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(02).
- Firmansyah, A. (2017). Model Sistem Dinamik Untuk Pengembangan *Smart Economy* (Studi Kasus : Kota Surabaya). *Jurnal Teknik Its*, 6(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Mulivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, (2004). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Derah*, Yogyakarta. AMP YKP.

- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat Dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 45–71.
- lutfiah, L. ((2017)). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan. *jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mujino, M. I. P. R. R. (2020). Pengaruh Komposisi Pengelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/J.Solener.2019.02.027>
- Nuryanto, Y. A. A. (2021). Technology Acceptance Model Dalam Penerapan Sistem Pajak Online di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25273/Inventory.Vxix.X8974>
- Oktaviyani, W., & Nugraha, J. T. (2018). Pelaksanaan Program Smart City Di Kota Magelang (Studi Kasus Bappeda Kota Magelang). *Jurnal Mahasiswa Administrasi*, 02(01).
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sangadah, D. (2019). Perilaku Dana Pihak Ketiga Dalam Merespon Perubahan Variabel Ekonomi Makro Pada Bank Umum Swasta Nasional (Busn) Provinsi Jawa Timur Periode 2000-2012. *Jurnal Ekonomi*, 1(2).
- Sasana. (2018). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan

Desentralisasi Fiskal. *Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 2(1).

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Indonesia (Ikapi).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, Cv.

Tarigan, Azhari. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Utlum Nimiangge, D. S. M. E. Dan G. M. V. K. (2021). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pajak Daerah Dan Jumlah Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nduga Tahun 2009 -2018. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 100–109.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

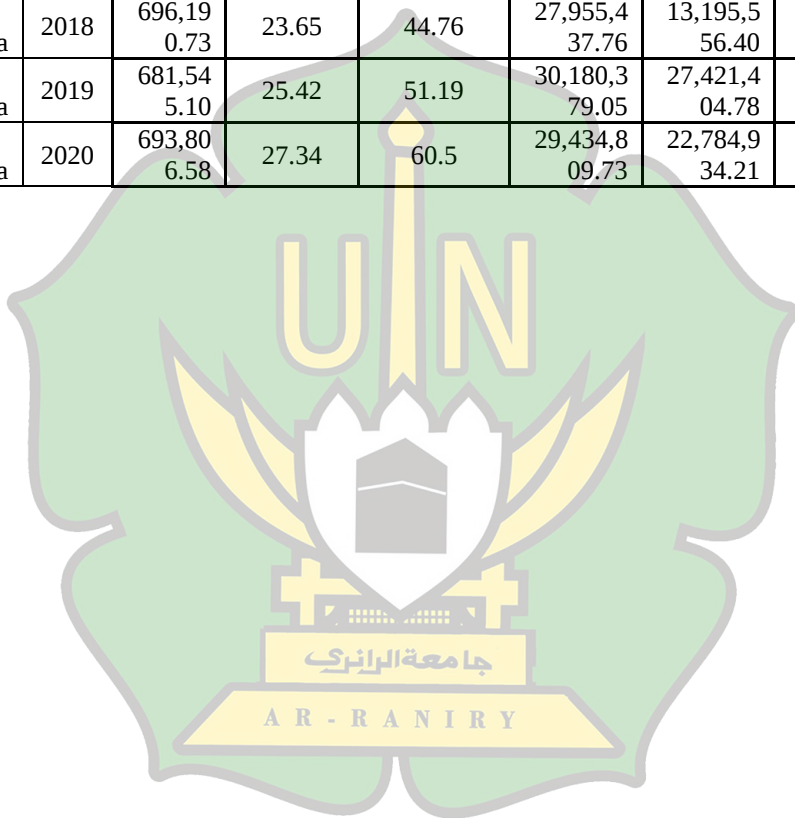
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN 1

kabupaten	tahun	PAD Perkapi ta (Rupiah)	jumlah lulusan PT (persen)	Jumlah Pengguna Internet (persen)	PDRB Perkapita (Rupiah)	DPK Perkapita (Rupiah)	Umk (Unit/1000 Penduduk)
Banda Aceh	2011	372,75 9.66	22.04	41.53	46,858,6 51.52	41,787,6 20.03	25
Banda Aceh	2012	422,24 1.47	22.94	45.87	49,352,1 83.42	55,118,0 63.94	25
Banda Aceh	2013	539,54 8.88	22.89	51.67	52,497,0 51.01	63,372,5 75.23	25
Banda Aceh	2014	688,48 8.83	24.78	54.34	54,114,8 54.17	70,871,2 33.95	24
Banda Aceh	2015	838,64 0.00	25.06	58.87	57,907,6 31.95	78,520,0 65.68	26
Banda Aceh	2016	1,014,4 65.88	31.16	63.65	61,986,5 20.42	61,540,8 38.90	38
Banda Aceh	2017	1,039,4 66.30	36.86	72.87	64,210,7 89.76	59,913,5 28.76	37
Banda Aceh	2018	928,95 9.34	34.55	64.96	66,462,1 76.22	70,120,4 21.26	38
Banda Aceh	2019	869,75 6.75	33.05	71.04	68,692,6 83.88	68,813,1 85.07	40
Banda Aceh	2020	900,47 5.53	26.97	76.27	73,158,1 69.86	79,331,4 01.07	47
Sabang	2011	714,91 1.57	10.63	17.87	25,650,0 00.00	29,672,0 31.68	31
Sabang	2012	783,33 4.61	10.86	18.07	26,940,0 00.00	33,080,3 57.93	29
Sabang	2013	849,83 2.04	14.38	23.54	28,590,0 00.00	63,265,2 84.18	45
Sabang	2014	1,304,9 66.37	15.67	25.89	30,290,0 00.00	56,076,4 27.02	55
Sabang	2015	1,493,3 76.26	17.75	29.76	32,220,0 00.00	132,866, 927.59	57
Sabang	2016	1,420,9 93.13	20.24	33.9	34,450,0 00.00	143,862, 114.09	65

Sabang	2017	1,405,8 10.56	20.89	38.81	37,450,0 00.00	155,672, 399.79	67
Sabang	2018	916,28 5.11	21.21	48.83	40,430,0 00.00	162,869, 109.95	67
Sabang	2019	1,701,2 58.61	27.97	57.2	44,610,0 00.00	172,009, 175.89	67
Sabang	2020	1,433,9 08.69	28.05	62.52	37,410,0 00.00	161,793, 091.73	59
Lhok seum awe	2011	165,84 6.18	9.39	20.66	26,750,0 00.00	12,521,8 92.13	13
Lhoks euma we	2012	157,38 3.56	12.85	21.34	27,980,0 00.00	18,151,8 20.76	13
Lhoks euma we	2013	197,63 9.78	10.27	23.91	29,050,0 00.00	18,950,5 59.95	12
Lhoks euma we	2014	259,95 6.89	12.85	25.99	30,870,0 00.00	17,402,7 68.66	12
Lhoks euma we	2015	295,96 8.56	17.65	34.77	32,760,0 00.00	25,805,6 96.76	12
Lhoks euma we	2016	288,69 1.97	17.98	35.55	33,160,0 00.00	23,777,8 52.92	12
Lhoks euma we	2017	316,49 7.37	19.45	36.45	33,760,0 00.00	26,464,7 99.56	14
Lhoks euma we	2018	322,75 2.54	25.83	43.31	34,420,0 00.00	30,632,9 96.20	14
Lhoks euma we	2019	296,59 4.35	24.77	52.87	36,310,0 00.00	19,627,2 76.76	16
Lhoks euma we	2020	348,09 0.72	27.52	60.7	39,200,0 00.00	30,364,2 19.74	18
Langsa	2011	141,17 1.35	10.52	19.37	18,317,7 13.61	8,195,54 2.70	4
Langsa	2012	106,51 5.91	11.83	23.67	19,312,6 60.94	9,801,65 4.90	4
Langsa	2013	358,30 0.33	10.5	27.1	20,524,1 89.26	8,740,62 5.06	4

Langsa	2014	701,22 1.65	14.78	31.51	21,877,1 66.58	9,319,98 4.77	4
Langsa	2015	656,60 7.30	15.32	30.46	23,356,5 97.75	11,206,4 56.09	20
Langsa	2016	718,92 8.25	17.55	36.12	24,980,4 40.71	11,302,1 38.37	21
Langsa	2017	700,21 6.56	23.13	38.28	26,450,8 37.54	13,337,8 19.25	25
Langsa	2018	696,19 0.73	23.65	44.76	27,955,4 37.76	13,195,5 56.40	23
Langsa	2019	681,54 5.10	25.42	51.19	30,180,3 79.05	27,421,4 04.78	25
Langsa	2020	693,80 6.58	27.34	60.5	29,434,8 09.73	22,784,9 34.21	24



Lampiran 2 Analisis Deskriptif

	PAD (Rp per kapita)	JLT (persen)	JPI (persen)	DPK (Rp per kapita)	PDRB (Rp per kapita)	UMKM (unit / 1000 penduduk)
Mean	37498274	289436.4	41.89925	20.66375	52989046	693585.2
Median	32960000	247234.5	38.54500	21.05000	30498608	694999.0
Maximum	73158170	668120.0	76.27000	36.86000	1.72E+08	1701259.
Minimum	18317714	41020.00	17.87000	9.390000	8195543.	106516.0
Std. Dev.	14616194	189578.1	16.83056	7.320202	48706867	420995.7
Skewness	0.964870	0.719298	0.331229	0.205588	1.281500	0.601394
Kurtosis	2.893078	2.440187	1.975438	2.217458	3.486894	2.577900
Jarque-Bera	6.225546	3.971581	2.480964	1.302397	11.34340	2.708114
Probability	0.044477	0.137272	0.289245	0.521421	0.003442	0.258191
Sum	1.50E+09	11577454	1675.970	826.5500	2.12E+09	27743408
Sum Sq. Dev.	8.33E+15	1.40E+12	11047.44	2089.829	9.25E+16	6.91E+12
Observations	40	40	40	40	40	40

Lampiran 3 Fixed Effect Metode

Dependent Variable: LPAD

Method: Panel Least Squares

Date: 08/05/23 Time: 14:34

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

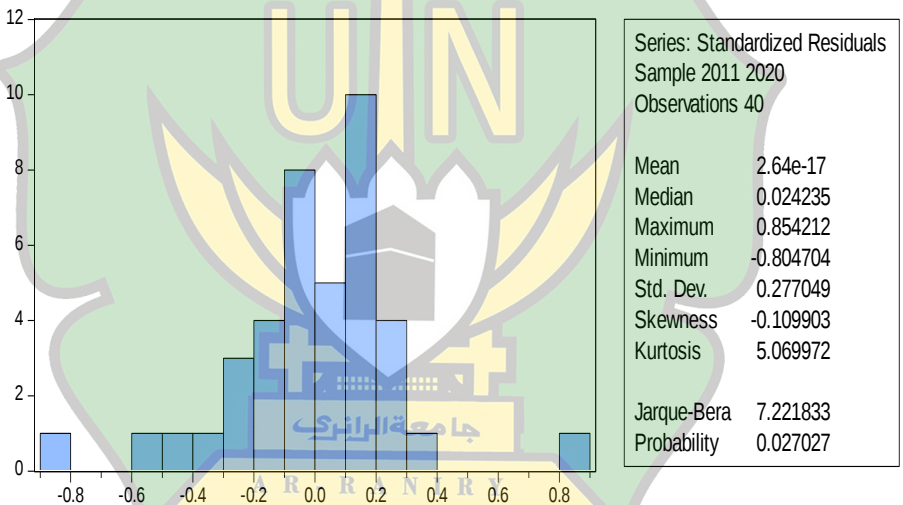
Total panel (balanced) observations: 40

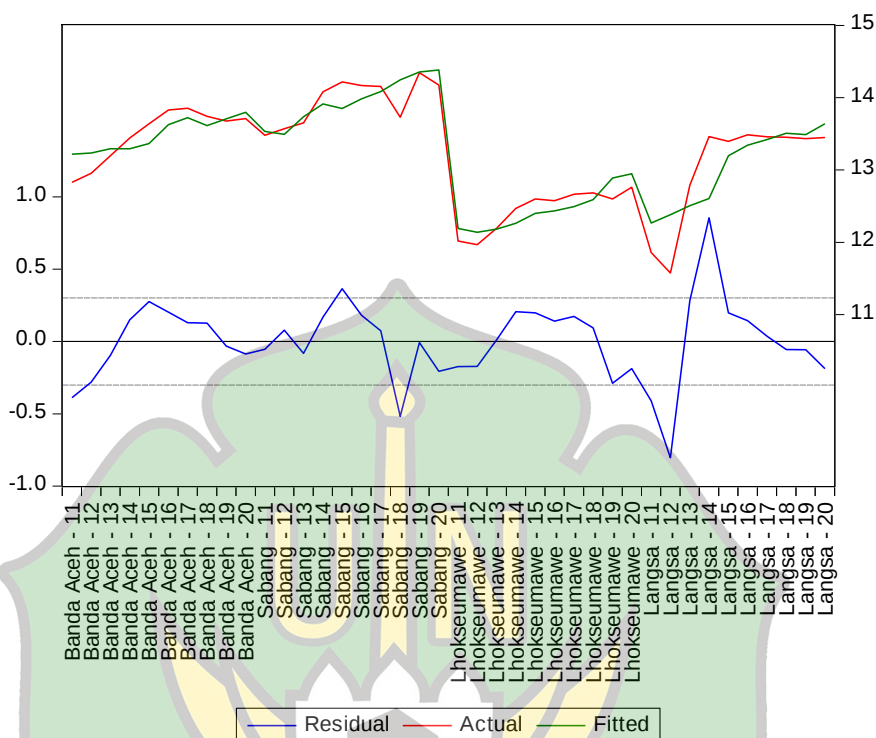
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.86720	2.877975	4.470923	0.0001
LJPI	0.751694	0.270263	2.781340	0.0089
LDPK	-0.209499	0.206901	-1.012556	0.3186
LUMKM	0.406441	0.131867	3.082212	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.850371	Mean dependent var	13.23346
Adjusted R-squared	0.823166	S.D. dependent var	0.716226
S.E. of regression	0.301184	Akaike info criterion	0.595440
Sum squared resid	2.993499	Schwarz criterion	0.890994
Log likelihood	-4.908808	Hannan-Quinn criter.	0.702303
F-statistic	31.25770	Durbin-Watson stat	1.218586
Prob(F-statistic)	0.000000		





Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel observations: 40

Cross-section effects were removed during estimation

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	18.00540	6	0.0062
Pesaran scaled LM	2.310960		0.0208
Bias-corrected scaled LM	2.088737		0.0367
Pesaran CD	3.892451		0.0001

Lampiran 4 Common Effect Metode

Dependent Variable: LPAD

Method: Panel Least Squares

Date: 08/05/23 Time: 14:40

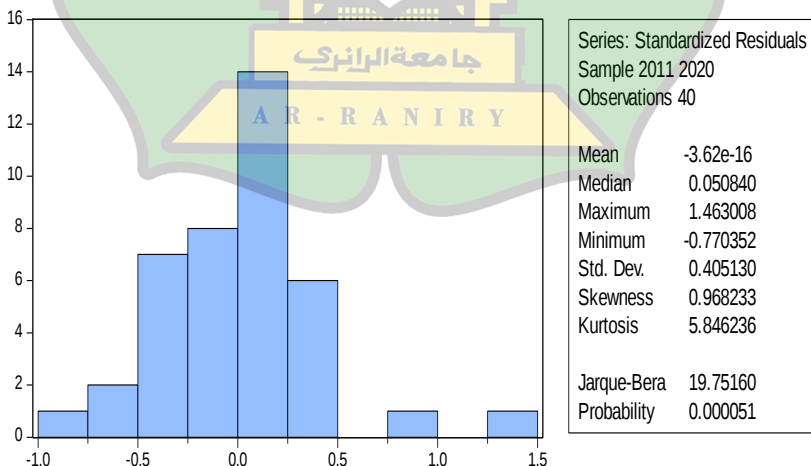
Sample: 2011 2020

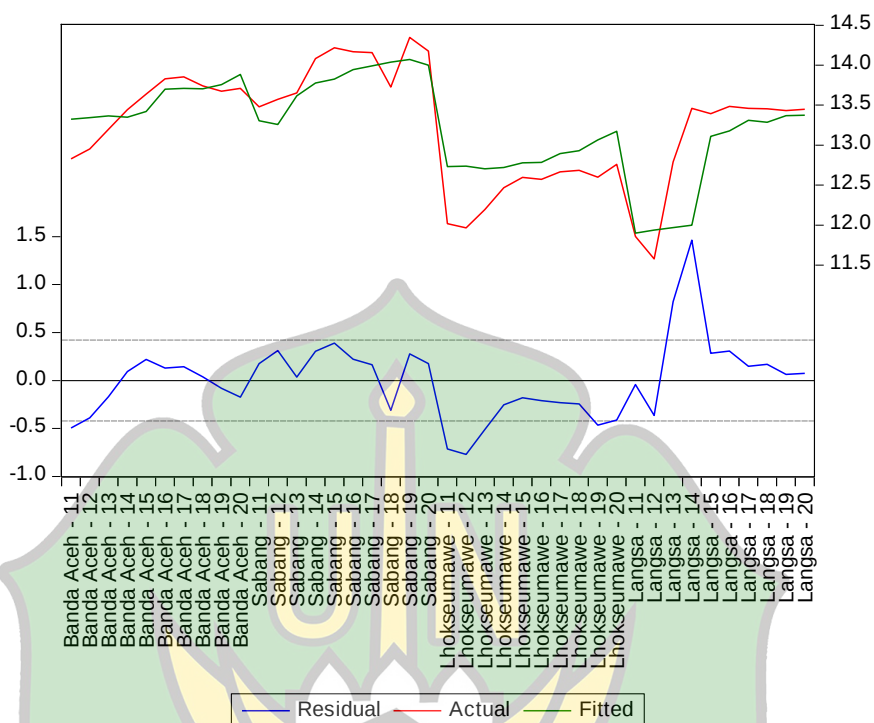
Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.38841	2.044765	5.080490	0.0000
LJPI	0.202620	0.183170	1.106186	0.2760
LDPK	-0.003424	0.146601	-0.023355	0.9815
LUMKM	0.696107	0.164615	4.228695	0.0002
R-squared	0.680045	Mean dependent var	13.23346	
Adjusted R-squared	0.653382	S.D. dependent var	0.716226	
S.E. of regression	0.421673	Akaike info criterion	1.205467	
Sum squared resid	6.401095	Schwarz criterion	1.374355	
Log likelihood	-20.10933	Hannan-Quinn criter.	1.266531	
F-statistic	25.50522	Durbin-Watson stat	0.762229	
Prob(F-statistic)	0.000000			





Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel observations: 40

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	13.36982	6	0.0375
Pesaran scaled LM	0.972784		0.3307
Pesaran CD	2.295631		0.0217

Lampiran 5 Random Effect Metode

Dependent Variable: LPAD

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/05/23 Time: 14:38

Sample: 2011 2020

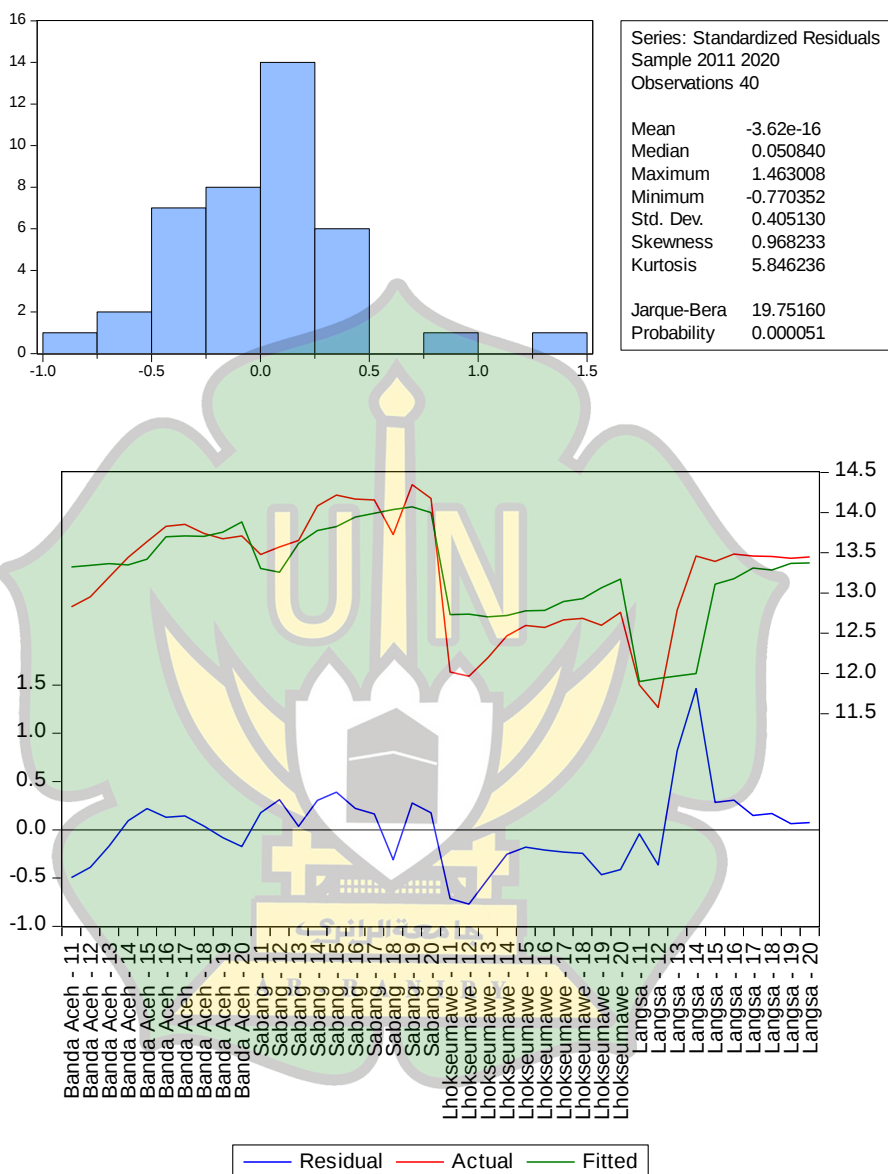
Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.38841	1.460495	7.112937	0.0000
LJPI	0.202620	0.130831	1.548714	0.1302
LDPK	-0.003424	0.104711	-0.032699	0.9741
LUMKM	0.696107	0.117578	5.920381	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.301184	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.680045	Mean dependent var	13.23346	
Adjusted R-squared	0.653382	S.D. dependent var	0.716226	
S.E. of regression	0.421673	Sum squared resid	6.401095	
F-statistic	25.50522	Durbin-Watson stat	0.762229	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.680045	Mean dependent var	13.23346	
Sum squared resid	6.401095	Durbin-Watson stat	0.762229	



Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 10

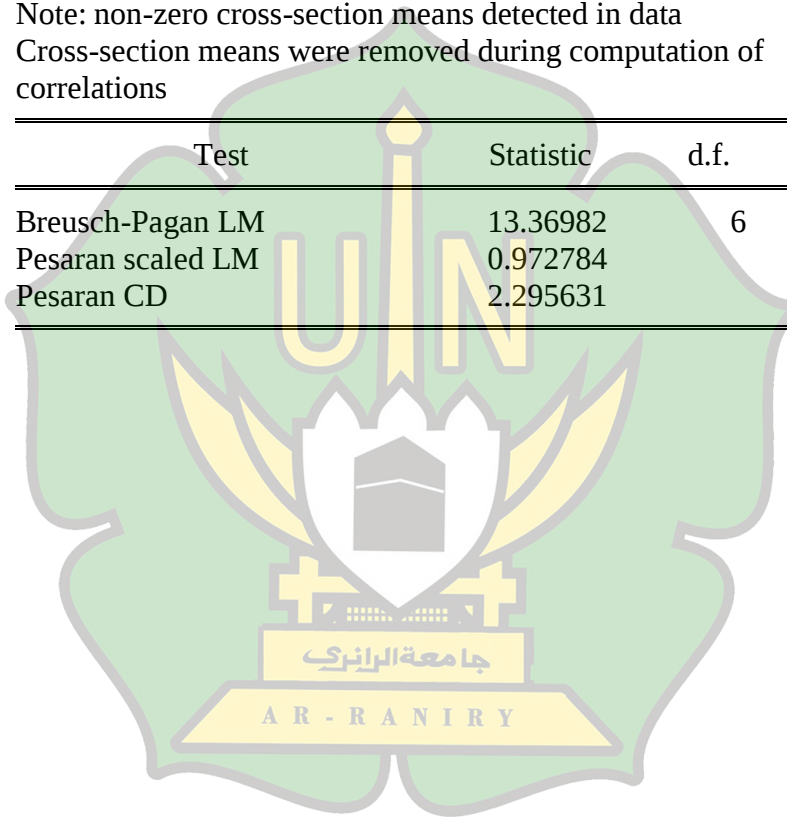
Cross-sections included: 4

Total panel observations: 40

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	13.36982	6	0.0375
Pesaran scaled LM	0.972784		0.3307
Pesaran CD	2.295631		0.0217



Lampiran 6 Uji T

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.521658	(3,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	30.401054	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LPAD

Method: Panel Least Squares

Date: 08/05/23 Time: 14:42

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.38841	2.044765	5.080490	0.0000
LJPI	0.202620	0.183170	1.106186	0.2760
LDPK	-0.003424	0.146601	-0.023355	0.9815
LUMKM	0.696107	0.164615	4.228695	0.0002
R-squared	0.680045	Mean dependent var	13.23346	
Adjusted R-squared	0.653382	S.D. dependent var	0.716226	
S.E. of regression	0.421673	Akaike info criterion	1.205467	
Sum squared resid	6.401095	Schwarz criterion	1.374355	
Log likelihood	-20.10933	Hannan-Quinn criter.	1.266531	
F-statistic	25.50522	Durbin-Watson stat	0.762229	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7 Uji F

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.564974	3	0.0000

**** WARNING:** estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LJPI	0.751694	0.202620	0.055925	0.0202
LDPK	-0.209499	-0.003424	0.031844	0.2482
LUMKM	0.406441	0.696107	0.003564	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LPAD

Method: Panel Least Squares

Date: 08/05/23 Time: 14:43

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.86720	2.877975	4.470923	0.0001
LJPI	0.751694	0.270263	2.781340	0.0089
LDPK	-0.209499	0.206901	-1.012556	0.3186
LUMKM	0.406441	0.131867	3.082212	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.850371	Mean dependent var	13.23346
Adjusted R-squared	0.823166	S.D. dependent var	0.716226
S.E. of regression	0.301184	Akaike info criterion	0.595440
Sum squared resid	2.993499	Schwarz criterion	0.890994

Log likelihood	-4.908808	Hannan-Quinn criter.	0.702303
F-statistic	31.25770	Durbin-Watson stat	1.218586
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 8 Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Rifqi
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 18 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190602187
Alamat : Jl Shalihin Komp. BTN No 15
Lamglumpang, Kec. Ulee Kareng
No Hp : 085276367612
Email : Rifqidekki18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 56 B. Aceh lulus pada tahun tahun 2010
SMP : MTs.S Jeumala Amal lulus pada tahun tahun 2013
SMA : SMA Negeri 4 B. Aceh pada tahun tahun 2016
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry pada tahun tahun 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Jafar
Nama Ibu : Ita Zahara
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orang Tua : Jl Shalihin Komp. BTN No 15
Lamglumpang, Kec. Ulee Kareng